



**KEPENTINGAN INDIA DALAM KONFLIK  
PERBATASAN TIONGKOK-BHUTAN DI DOKLAM**

*(India's Interest on Tiongkok-Bhutan Border Conflict in Doklam)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

**Oleh:**

**Yuniansyah Surya Pratama**

**120910101060**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Riyadi Santoso, dan Ibunda Hartatik yang terus mendukung serta mendoakan saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-Adik saya, Sandi Fitra Hardinata dan Muhammad Fahmi Hardinata yang terus memberikan semangat serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Almamater yang penulis banggakan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

## MOTTO

*“Apa yang nampak sebagai suatu kemurahan hati, sering sebenarnya tiada lain daripada ambisi yang terselubung, yang mengabaikan kepentingan-kepentingan kecil untuk mengejar kepentingan-kepentingan yang lebih besar”<sup>1</sup>*

**(Francosis de la Rochefoucauld)**

---

<sup>1</sup> Peter, *Vauvenargues and La Rochefoucauld*, Manchester, Manchester University Press, 1974, Hal 70

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuniansyah Surya Pratama

NIM : 120910101060

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kepentingan India dalam Konflik Perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam” merupakan hasil karya sendiri, menggunakan kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari karya ilmiah ini dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bukti dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2019

Yang menyatakan,

Yuniansyah Surya Pratama

NIM. 120910101060

**SKRIPSI**

**KEPENTINGAN INDIA DALAM KONFLIK  
PERBATASAN TIONGKOK-BHUTAN DI DOKLAM**

*(India's Interest on Tiongkok-Bhutan Border Conflict In Doklam)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yuniansyah Surya Pratama**

**120910101060**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**Pembimbing:**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

**LEMBAR PENGESAHAN**

Telah disetujui skripsi dengan judul **“Kepentingan India dalam Konflik Perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam”**  
*(India’s Interest on Tiongkok-Bhutan Border Conflict In Doklam)*

Jember, ..... 2019

Penyusun,

Yuniansyah Surya Pratama

NIM. 120910101060

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

NIP. 196402081989021001

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

NIP. 195904231987021001

Mengetahui,

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno M. Kes

196106081988021001

## RINGKASAN

**KEPENTINGAN INDIA DALAM KONFLIK PERBATASAN TIONGKOK-BHUTAN DI DOKLAM;** Yuniansyah Surya Pratama; 120910101060; 71 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Konflik di dataran tinggi Doklam menjadi salah satu fenomena menarik yang patut untuk ditelaah lebih lanjut. Konflik tersebut dimulai pada Juli 2017 lalu, dimana saat itu Tiongkok sedang membangun jalan di *Sinchela*. Aktifitas Tiongkok tersebut terhenti ketika mereka tiba-tiba dihadapkan pada tentara India yang datang dari Bhutan dan kemudian memblokir pembangunan jalan tersebut. India hadir sebagai sekutu dari Bhutan yang memang telah lama memiliki kerjasama satu sama lain, khususnya tentang hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Ikatan tersebut tertera jelas pada “India-Bhutan Friendship Treaty” pada tahun 2017. Aktifitas Tiongkok yang semakin mendekat dengan perbatasan dianggap India dan Bhutan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan Doklam. Hal tersebut menjadi dasar bagi India dalam aksi pemblokiran aktifitas Tiongkok di Doklam tersebut.

Di lain sisi, Tiongkok justru sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka menganggap proyek pembangunan jalan tersebut masih dalam batas wilayah negaranya. Tiongkok juga menambahkan argumen bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, baik terhadap Bhutan maupun India. Tiongkok justru balik mempertanyakan tentang adanya pasukan militer India di daerah tersebut. Mereka beranggapan bahwa seharusnya India tidak harus memiliki masalah dengan pembangunan yang dilakukan Tiongkok tersebut, karena pembangunan tersebut tidak menjamah wilayah India sedikitpun.

India menjawab ancaman Tiongkok dengan pengerahan militernya ke wilayah konflik. Angkatan Darat India terus bergerak pelan-pelan menuju ke “*daerah siaga operasional*” mereka yang terletak di *Sikkim* dan *Arunachal Pradesh*. Disisi lain, Tiongkok tetap bersikukuh untuk meneruskan proyek pembangunannya, karena pembangunan infrastruktur tersebut dianggap masih

dalam teritorial mereka. Sehingga, konflik antara Tiongkok dan India di Doklam justru jauh dari kata berakhir hingga saat ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa ancaman dan kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam. Teori yang digunakan adalah teori kepentingan nasional dari Nuechterlein. Data kemudian dianalisis dan disusun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa Keterlibatan India pada konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam dikarenakan terancamnya ikatan kerjasama militer dan ekonomi antara India-Bhutan oleh perilaku Tiongkok di wilayah perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam. Pada kepentingan pertahanan dan keamanan, India berusaha mempertahankan stabilitas keamanan dan hegemoni di wilayah Bhutan dari ancaman Tiongkok. Sementara pada kepentingan ekonomi, India berusaha mempertahankan pengaruh dan kerjasama ekonomi dengan Bhutan dari ancaman dan pengaruh Tiongkok.



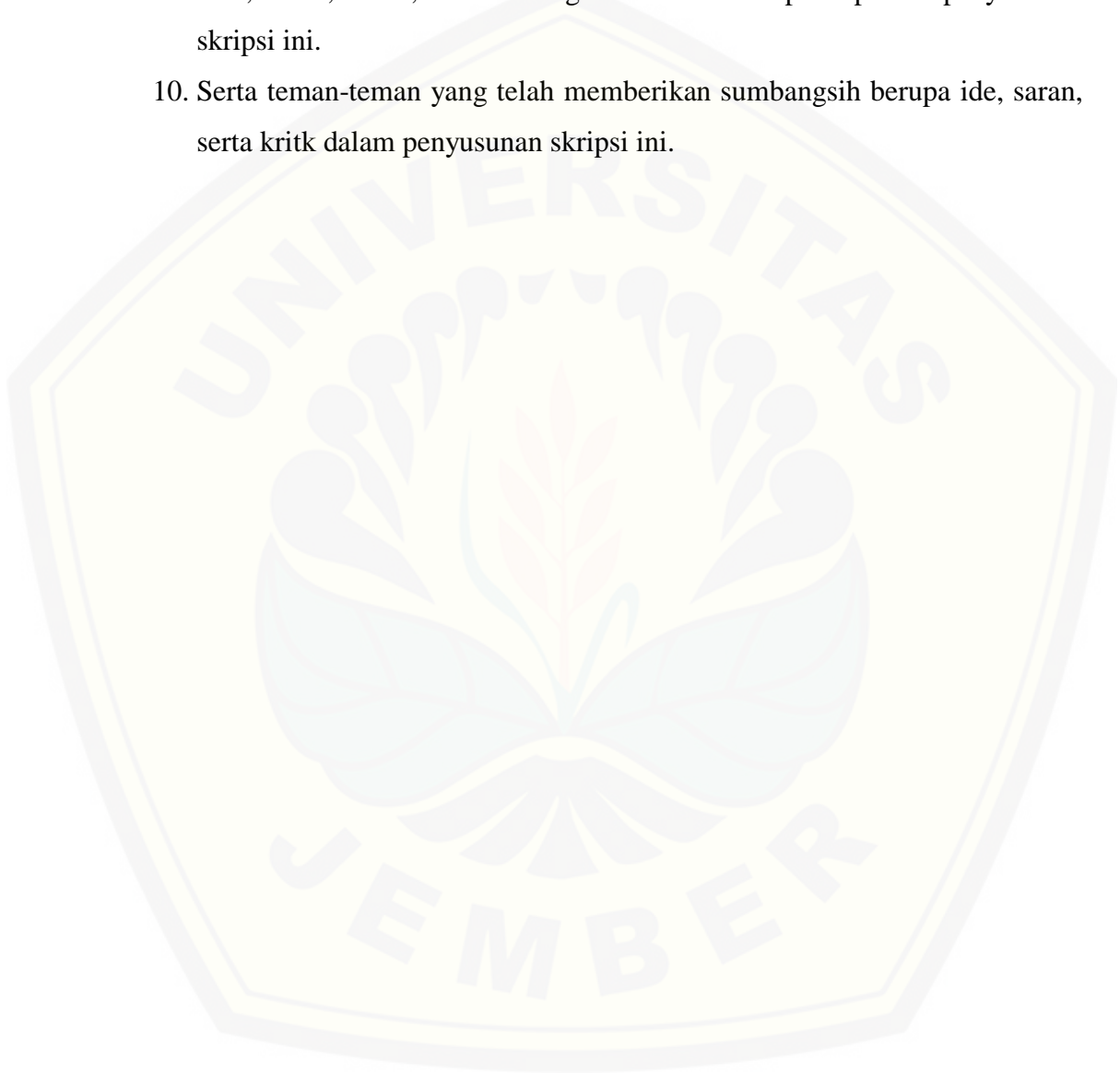
## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmad serta hidayahnya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepentingan India dalam Konflik Perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam”. Skripsi ini disusun penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing utama dan Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendukung dan membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Jember.
4. Semua mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah menjadi tempat tukar pikiran terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada proses penyusunan skripsi ini.
6. Puspita Mey Anggrainy selaku pasangan dari penulis atas dorongan serta semangatnya terhadap proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar PSRM Sardulo Anorogo: Danu, Kolik, Doyok, Kentus, Bowo, Nita, Iwan, Yulid, Sem, yang telah menjadi penyemangat penulis dalam proses skripsi ini.

8. Teman – teman kos brantas: Parsit Suseno, Dimas Yanis, Arya Candra, Randa, Saiful, yang telah bersedia menjadi teman ngopi ketika penulis menemui jalan buntu pada proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman “Klan Ayam” dan “Sore Hore”: Jajang, Afrizal, Ian, Jaya, Arif, Anas, Dana, atas dukungan dan bantuan pada proses penyusunan skripsi ini.
10. Serta teman-teman yang telah memberikan sumbangsih berupa ide, saran, serta kritk dalam penyusunan skripsi ini.



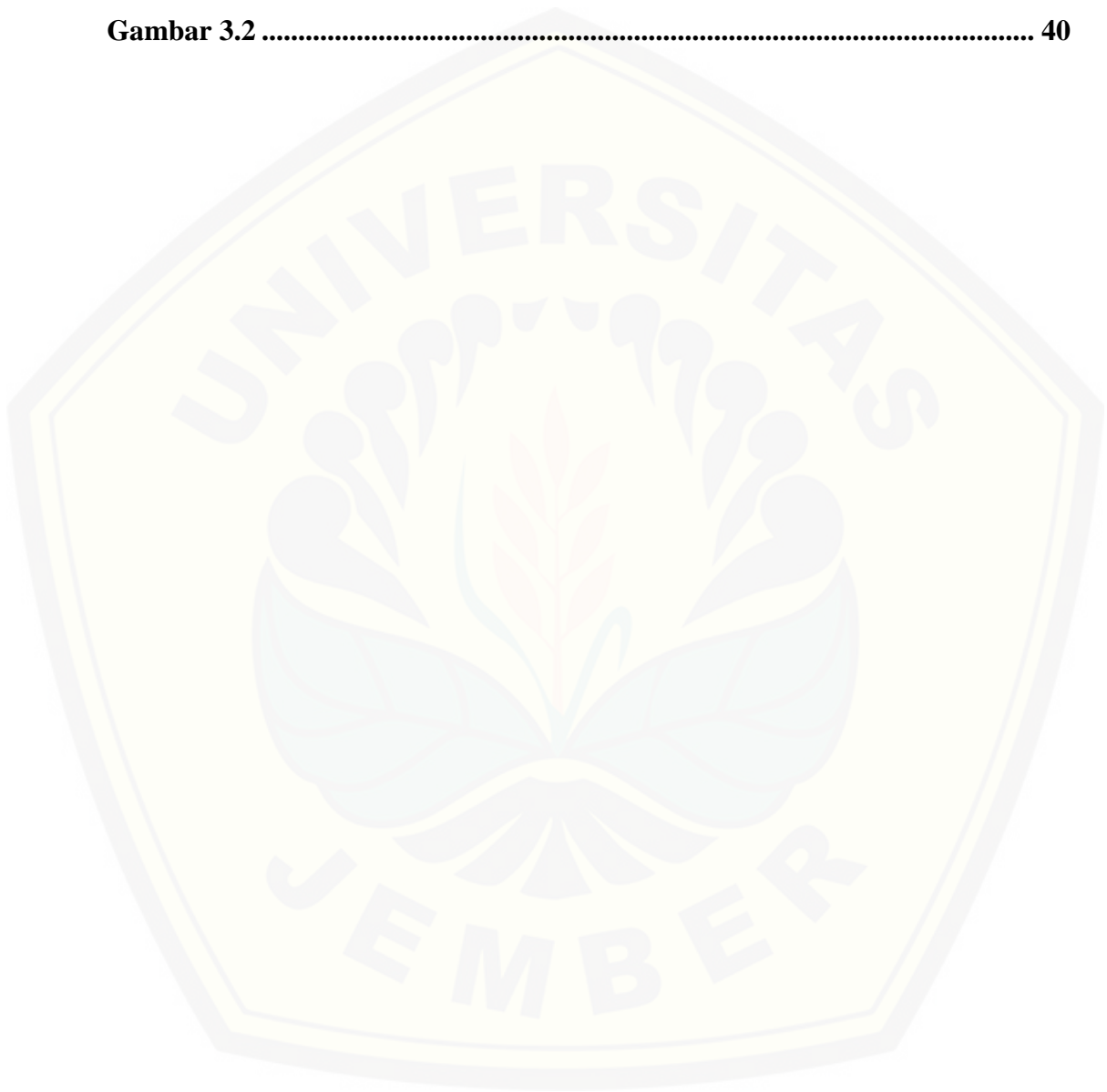
## DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Batasan Materi .....	4
1.2.2 Batasan Waktu .....	5
<b>1.3 Rumusan masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>5</b>
<b>1.6 Argumen Utama .....</b>	<b>10</b>
<b>1.7 Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1.7.1 Pendekatan Penelitian .....	11
1.7.2 Jenis Penelitian.....	11
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
<b>1.8 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>PERKEMBANGAN KONFLIK PERBATASAN DI DOKLAM .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Sejarah Konflik di Doklam.....</b>	<b>13</b>

2.2 Fluktuasi Konflik perbatasan antara Tiongkok-Bhutan.....	20
2.3 Memanasnya Konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam pasca keterlibatan India .....	28
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN INDIA DALAM KONFLIK DI DOKLAM .....</b>	<b>38</b>
3.1 Gambaran Umum Doklam .....	38
3.2 Ancaman Terhadap Pertahanan India.....	42
3.3 Ancaman Terhadap Perekonomian India .....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>ANALISIS KEPENTINGAN INDIA PADA KONFLIK DI DOKLAM .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kepentingan Pertahanan dan Keamanan .....	55
4.2 Kepentingan Ekonomi.....	58
4.3 Kepentingan Tata internasional.....	62
4.4 Kepentingan Ideologi .....	65
<b>BAB V.....</b>	<b>69</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1 ..... 18**  
**Gambar 3.1 ..... 38**  
**Gambar 3.2 ..... 40**



## DAFTAR SINGKATAN

- LBA : *Land Boundary Agreement (Perjanjian Batas Tanah)*
- BCIM-EC : *Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (Koridor Ekonomi Bangladesh-China-India-Myanmar)*
- SAARC : *South Asian Association for Regional Cooperation (Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional)*
- GMS-EC : *Greater Mekong Subregion Economic Cooperation (Kerjasama Ekonomi Subregional Sungai Mekong)*
- PLA : *The People's Liberation Army (Tentara Pembebasan Rakyat)*
- RGOB : *Royal Government of Bhutan (Pemerintahan Kerajaan Bhutan)*
- BIMSTEC : *The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (Inisiatif Teluk Bengal untuk Kerjasama Teknis dan Kerjasama Ekonomi)*
- PDB : *Produk Domestik Bruto*
- CPEC : *China-Pakistan Economic Corridor (Koridor Ekonomi China-Pakistan)*
- SIMBEX : *Singapore-Indian Maritime Bilateral Exercise (Kerjasama Pelatihan Bilateral Maritim Singapura-India)*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam menjadi salah satu fenomena menarik yang patut untuk ditelaah lebih lanjut. Doklam sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada di kawasan himalaya yang membatasi secara langsung antara Tiongkok dan Bhutan. Wilayah tersebut notabene masih belum jelas kepemilikannya. Pihak Tiongkok merasa bahwa Doklam masih dalam wilayah teritorialnya berdasarkan pada “Konvensi Anglo-Cina” pada tahun 1890. Sementara itu disisi lain, Bhutan merasa bahwa wilayah Doklam merupakan wilayah yang sejak dulu menjadi teritorial negaranya. Oleh karena itu, status dari wilayah Doklam ini masih menjadi “wilayah sengketa’ antara Tiongkok dan Bhutan. Konflik di Doklam yang notabene adalah konflik perbatasan antara Tiongkok dan Bhutan menjadi semakin menarik ketika India hadir secara langsung ke dalam konflik tersebut.

Kehadiran India pada konflik di Doklam bukan tanpa dasar. India dan Bhutan memang telah menandatangani perjanjian untuk bekerjasama dalam berbagai hal. Salah satu poin dari perjanjian tersebut adalah tentang ikatan persahabatan dan kerja sama erat antara Bhutan dan India. Ikatan tersebut tertera jelas pada “India-Bhutan Friendship Treaty” pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pemerintah India berjanji untuk tidak melakukan campur tangan pada administrasi internal Bhutan. Pada bagian lainnya, Pemerintah Bhutan setuju untuk dibimbing oleh Pemerintah India sehubungan dengan hubungan eksternalnya (India-Bhutan Friendship Treaty, 2007). Berkaitan dengan perjanjian tersebut, maka India yang merasa bahwa perilaku Tiongkok di wilayah perbatasan perlu mendapat sorotan khusus dari Pemerintah India.

Konflik tersebut dimulai pada Juli 2017 lalu, dimana saat itu Tiongkok sedang membangun jalan di *Sinchela*. Aktifitas Tiongkok terhenti ketika mereka tiba-tiba dihadapkan pada tentara India yang datang dari Bhutan dan kemudian memblokir pembangunan jalan tersebut (Apdf Magazine, 2017). Pembangunan

jalan raya oleh Tiongkok dimulai dari daerah *Yadong* menuju ke daerah *Doka La* yang mana berjarak sekitar dua kilometer dari markas angkatan darat Bhutan di *Zompelri* (Economics Times, 2018). Aktifitas Tiongkok yang semakin mendekat dengan perbatasan dianggap India dan Bhutan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keamanan di wilayah Doklam.

Di lain sisi, Tiongkok justru sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka menganggap proyek pembangunan jalan tersebut masih dalam batas wilayah negaranya. Tiongkok juga menambahkan argumen bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, baik terhadap Bhutan maupun India (Harian Seputar Indonesia, 2017). “Itu adalah fakta yang tak terbantahkan yang didukung oleh bukti historis dan yurisprudensi,” kata juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok *Lu Kang* (Tirto, 2017). Tiongkok justru balik mempertanyakan tentang adanya pasukan militer India di wilayah Doklam. Mereka beranggapan bahwa seharusnya India tidak harus memiliki masalah dengan pembangunan yang dilakukan Tiongkok tersebut, karena pembangunan itu tidak menjamah wilayah India sedikitpun (Apdf Magazine, 2017).

Selanjutnya, ketegangan antara Tiongkok dan India pada konflik di Doklam semakin memanas. Pihak India memaksa Tiongkok untuk memindahkan peralatan konstruksi dari lokasi. Akan tetapi India masih belum mau menuruti perintah Tiongkok. India justru mulai mengerahkan militernya ke wilayah konflik. Angkatan Darat India terus bergerak pelan-pelan menuju ke “*daerah siaga operasional*” mereka yang terletak di *Sikkim* dan *Arunachal Pradesh*. Sementara itu di wilayah timur, India menempatkan 33 Korps yang berpusat di *Sukna*. Masing-masing divisi Korps memiliki 10.000-15.000 tentara yang telah melakukan penyesuaian dengan medan untuk daerah dengan ketinggian tinggi ke depan (Harian Jejak Tapak, 2017). Tidak hanya itu, pangkalan Angkatan Udara India di Timur Laut juga mempertahankan siaga operasional tinggi, dengan patroli udara tempur secara regular. Fenomena tersebut mampu menggambarkan betapa seriusnya India dalam konflik di Doklam

Disisi lain, Tiongkok tetap bersikukuh untuk meneruskan proyek pembangunannya, karena pembangunan infrastruktur tersebut dianggap masih



dalam teritorial mereka. Tiongkok tidak gentar dengan perilaku India yang terkesan agresif dalam menyikapi konflik tersebut. Tentara Pembebasan Rakyat atau *The People's Liberation Army* (PLA) diberitakan tengah membangun pusat komando pasukan militer di sekitar daerah terjadinya konflik di Doklam. PLA juga sedang membangun infrastruktur militer yang berjarak sekitar 3 mil dari daerah konflik di Doklam. Infrastruktur militer yang dimaksud meliputi tempat peletakan mortir dan senapan mesin serta sembilan bangunan tiga lantai yang digunakan sebagai barak, ditambah juga sekitar 300 kendaraan militer (Sputnik News, 2017). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, *Hua Chunying* mengatakan bahwa pasukan tentara Tiongkok akan terus melakukan patroli di wilayah Doklam serta terus menegakkan hak-hak kedaulatannya untuk melindungi teritori kedaulatan Tiongkok, sesuai dengan peraturan perbatasan berdasarkan sejarah (Reuters, 2017).

Berbulan-bulan suasana panas tercipta antara Tiongkok dan India di Doklam. Militer Tiongkok dan India saling berhadapan satu sama lain disana. Banyak pakar politik meramalkan pertempuran kedua negara tersebut sangat dekat dari kata pecah. Akan tetapi, faktanya tidak demikian. Kedua negara bersepakat untuk mengendurkan tensi di daerah konflik. Menurut keterangan dari Menteri Luar Negeri India, Tiongkok dan India telah sepakat untuk beristirahat sejenak dalam konflik Doklam, serta menarik pasukan masing-masing dari perbatasan yang bersinggungan dengan Bhutan tersebut. Akan tetapi, pernyataan itu tidak disertai rincian dan tindakan lebih lanjut mengenai penarikan militer kedua belah pihak dari daerah konflik (Reuters, 2017). Faktanya, pasukan militer dari kedua negara masih saling berhadapan di sana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akhir dari konflik di Doklam antara India dan Tiongkok masih cukup lama untuk terjadi.

Perilaku India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam menjadi sorotan yang cukup menarik. India yang tidak berbatasan langsung dengan Doklam justru memilih terjun langsung ke dalam konflik tersebut dengan melakukan pemblokiran atas proyek pembangunan jalan raya yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Doklam. Di lain sisi, Tiongkok justru mempermasalahkan

keterlibatan India dalam konflik perbatasan yang sama sekali tidak menyentuh wilayah kedaulatan teritorialnya. Fenomena tersebut membuat konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam tidak menjadi konflik antara Tiongkok dan Bhutan, akan tetapi antara Tiongkok dengan India. Terlibatnya India secara langsung dalam konflik di Doklam menimbulkan pertanyaan yang cukup besar dan sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh atas motif dan kepentingan India terjun langsung ke dalam konflik di Doklam.

Melihat penjabaran diatas, maka India yang terkesan kuatir atas perilaku Tiongkok di wilayah Doklam yang dalam kasus ini adalah pembangunan jalan raya menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis ingin mengoneksikan antara kepentingan nasional India dengan keterlibatan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam, sehingga diharapkan menemukan penyebab tentang kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam.

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi dua bagian, yakni batasan materi dan batasan waktu. Ruang lingkup ini yang nantinya membatasi permasalahan serta pembahasan serta akan menentukan tingkatan analisis pada konsep dan teori yang akan digunakan. Penetapan ruang lingkup pembahasan ini akan memudahkan penulis secara komprehensif untuk menjelaskan fokus bahasan pada titik tertentu.

### **1.2.1 Batasan Materi**

Batasan materi digunakan untuk menjelaskan ruang pembahasan dari peristiwa atau objek yang akan dianalisis. Berdasarkan tema utama, maka penulis memfokuskan permasalahan pada kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-India di Doklam. Penulis membatasi materi yang akan dibahas dalam tulisan ini agar tidak melebar keluar dari topik utama.

### 1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu digunakan untuk membatasi rentang waktu yang dikaji penulis dalam karya tulis ilmiah ini agar tidak melebar jauh dari topik utama. Rentang waktu yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini dimulai setelah penghadangan India terhadap aktifitas Tiongkok di Doklam yaitu pada Juli 2017 hingga Februari 2019.

### 1.3 Rumusan masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan utama yang dijadikan pijakan bagi penulis dalam menentukan desain dan strategi penelitian. Rumusan masalah muncul karena adanya kesenjangan antara fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengangkat permasalahan mengenai: “Apa kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam?”

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan pasti memiliki tujuan tertentu, karena tujuan akan memberikan arah pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian penulis adalah mengetahui kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam.

### 1.5 Kerangka Konseptual

Dalam menjelaskan “Kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam”, penulis menggunakan acuan berupa konsep dan teori dari Ahli. Konsep dan teori yang digunakan dan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Teori kepentingan nasional (*national interest*) adalah konsep/teori yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Para praktisi hubungan internasional sering memakai konsep

kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Donald E. Nuechterlein memberikan definisi dari konsep kepentingan nasional. Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional adalah kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh negara yang berdaulat yang mencakup pula lingkungan eksternalnya.

Nuechterlein mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi empat, yaitu kepentingan pertahanan dan keamanan (*defence interest*), kepentingan ekonomi (*economic interest*), tata internasional (*international order*) dan kepentingan ideologi (*ideological interest*) (Bakry, 1999). Kepentingan pertahanan dalam pandangan Nuechterlein menyangkut tentang kepentingan untuk melindungi keamanan wilayah serta warga negaranya dari ancaman negara lain. Selanjutnya, kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain. Ketiga, kepentingan tata internasional yaitu merupakan kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem internasional yang menguntungkan bagi negaranya. Terakhir, kepentingan ideologi merupakan kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi suatu negara dari ancaman pengaruh ideologi negara lain.

Pada substansi pertahanan dan keamanan, Nuechterlein menekankan pada kesadaran akan bahaya dan ancaman dari pihak luar sangat besar, lebih besar lagi jika tidak terlihat karena *sense of defence* negara tersebut sudah menghilang. Pertahanan dan keamanan memiliki peran penting dalam menjaga nilai inti dari kepentingan suatu negara. Strategi dalam pertahanan dan keamanan dapat mendukung kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri dalam persaingan ekonomi global. Negara yang memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat akan mampu mengawal ketiga unsur yang berorientasi ke luar, yakni kepentingan ekonomi, sistem tata internasional dan ideologi.

Nuechterlein selanjutnya menganggap bahwa kepentingan ekonomi tergolong dalam nilai inti dari kepentingan nasional sebuah negara. Kepentingan ekonomi yang dimaksud Nuechterlein adalah kepentingan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi

dengan negara lain. Definisi diatas menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan ekonomi dari Nuechterlein menaruh kerjasama ekonomi dengan negara lain sebagai poin utamanya. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi suatu negara menjadi prioritas dan wajib dijaga dari ancaman pihak luar.

Pada kepentingan tata internasional, Nuechterlein menjelaskan bahwa kepentingan tata internasional yang dimaksud adalah kepentingan yang berkaitan dengan pemeliharaan kerangka politik dan ekonomi internasional dimana negara merasa aman, serta dimana warga negara dan sistem perdagangannya terlindungi di luar batas negara. Sistem tata internasional merupakan sistem yang mengatur hubungan antar negara sesuai dengan kondisi internasional. Pada sistem tata internasional, setiap negara berinteraksi satu sama lain berdasarkan perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara. Pembuatan perjanjian tersebut dapat dilakukan ketika negara tersebut memiliki sebuah kapabilitas tertentu sehingga dapat menjadi pemimpin atau hegemon bagi negara lainnya.

Pada kepentingan ideologi, Nuechterlein menjelaskan bahwa setiap negara harus menjaga keutuhan ideologinya dari ancaman pihak luar. Ideologi memuat identitas sebuah negara yang merupakan prinsip dan gagasan yang dibuat untuk menentukan jati diri sebuah negara. Oleh karena itu, Nuechterlein menempatkan kepentingan ideologi dalam nilai inti dari kepentingan nasional sebuah negara dan setiap negara wajib menempatkan ideologi sebagai prioritas utama untuk diilindungi dari potensi ancaman yang mungkin datang dari pihak luar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep klasifikasi kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun meramalkan perilaku dan kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam. Nuechterlein selanjutnya mengklasifikasi konsep dasar dari kepentingan nasional menjadi empat, yakni kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, serta kepentingan ideologi. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada aspek kepentingan dasar yang akan menjadi dasar dari setiap perilaku setiap negara baik di ranah nasional maupun internasional. Pada penelitian ini penulis mengambil

dua dari empat klasifikasi kepentingan nasional oleh Donald E, Nuechterlein, yakni kepentingan pertahanan dan kepentingan ekonomi. Kedua aspek tersebut dianggap relevan dan mampu memberikan gambaran atas kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam. Kedua aspek kepentingan lainnya, yakni kepentingan tata internasional dan kepentingan ideologi dianggap tidak cukup relevan dalam menggambarkan kepentingan India di Doklam.

Keentingan pertahanan dan keamanan memiliki peran penting dalam menjaga nilai inti dari kepentingan suatu negara. Strategi dalam pertahanan dan keamanan dapat mendukung kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri dalam persaingan ekonomi global. Pada kasus ini, Doklam memang tidak secara langsung bersentuhan dengan wilayah teritorial kedaulatan India. Akan tetapi, wilayah Doklam menjadi perhitungan India dikarenakan India memiliki beberapa ikatan dengan Bhutan. Pertama, Bhutan merupakan pasar, tujuan investasi dan sumber listrik bagi India. Sehingga, India akan menjaga pengaruhnya terhadap Bhutan dari ancaman Tiongkok untuk keberlangsungan kerjasama ekonomi India-Bhutan

Kedua, Bhutan dan India telah terikat dalam kerjasama militer seperti yang tertera pada “India-Bhutan Friendship Treaty” tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan penggunaan wilayahnya untuk kegiatan yang membahayakan keamanan nasional Bhutan dan India serta kepentingan pihak lain (India-Bhutan Friendship Treaty, 2007). Ikatan kerjasama ekonomi dan perjanjian militer tersebut mengharuskan India untuk melindungi Bhutan terhadap ancaman dari Tiongkok. Perlindungan tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan pengaruh dan hegemoni India terhadap keberlangsungan kerjasama ekonomi dan militer India-Bhutan.

Pada kepentingan ekonomi, India telah lama mendominasi perekonomian Bhutan. India merupakan mitra dagang terbesar bagi Bhutan. Hampir 80,56% dari total impor Bhutan berasal dari India. Sementara itu, India menyediakan pasar untuk 84,56% dari ekspor Bhutan. India merupakan penyumbang bantuan terbesar bagi Bhutan. Pada tahun 2000 hingga 2017, Bhutan telah menerima bantuan senilai 4,7 milyar dollar dari India. Bantuan tersebut dipusatkan pada pembiayaan

proyek pembangkit listrik tenaga air di Bhutan yang kemudian aliran listriknya akan dijual kembali ke India. Ekspor listrik Bhutan ke India telah menjadikan Bhutan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di Asia.

Sementara itu, kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga air antara India dan Bhutan telah memberikan keuntungan yang signifikan bagi India. India dapat membeli listrik yang murah dari Bhutan. India hanya perlu mengeluarkan biaya Rs. 1,5 per unit. Fakta bahwa sekitar 40% masyarakat India kekurangan listrik menempatkan untuk memprioritaskan hubungan kerjasama tersebut dengan Bhutan agar bisnis dan industri di negaranya dapat berkembang serta memiliki dampak terhadap perekonomian nasional India. Oleh karena itu, India akan mempertahankan kerjasama dan pengaruh ekonominya terhadap Bhutan dari ancaman dan pengaruh Tiongkok.

Pada aspek kepentingan sistem tata internasional, klaim teritori oleh Tiongkok berpotensi akan membuat sistem tata internasional baru, khususnya pada sistem perekonomian internasional. Tiongkok telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga India, seperti Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan. Kerjasama tersebut merupakan sebagian dari implementasi dari strategi “*One Belt One Road*” Tiongkok, yang akan membuat Tiongkok semakin mudah dalam membentuk sistem perekonomian internasional yang bertumpu pada Tiongkok. Sementara itu, India juga memiliki kepentingan dalam membuat sistem internasional berdasarkan konflik di Doklam. Strategi kebijakan “*Neighbourhood First*” dan “*Act East*” yang tertuang dalam beberapa kerjasama perekonomian India menempatkan wilayah Doklam sebagai poin utama terhadap kelancarannya.

Akan tetapi, konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam terlalu sempit untuk menciptakan sistem perekonomian regional yang baru, baik bagi India, maupun Tiongkok. Kerjasama perekonomian yang berpotensi muncul berdasarkan wilayah Doklam ini hanya berpotensi membentuk sistem perekonomian regional, maupun sub-regional. Sementara itu, masih terdapat beberapa aspek lain di dunia internasional yang akan lebih banyak kontribusi terhadap pembentukan sistem tata internasional bagi India maupun Tiongkok.

Oleh karena itu, pada aspek kepentingan tata internasional dirasa belum cukup relevan untuk menggambarkan kepentingan India di Doklam.

Pada aspek kepentingan ideologi, konflik di Doklam memiliki sedikit kemungkinan bagi India maupun Tiongkok untuk menyebarkan pengaruh ideologinya terhadap negara-negara lain. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah perang pengaruh tentang ideologi dalam perekonomian antara “*kapitalisme liberal*” melawan “*kapitalisme otoriter*”. Peperangan ideologi antara kedua negara tersebut dikumandangkan oleh pihak Tiongkok saat kongres ke-19 Partai Komunis Tiongkok yang dilaksanakan pada Oktober 2017 silam. Mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka membuka jalan bagi *Xi Jinping* untuk memerintah tanpa batas waktu. Pada waktu pidatonya di kongres tersebut, *Xi* menyatakan bahwa Tiongkok sekarang akan menjadi pusat perhatian di dunia. Beliau juga memuji kebaikan kapitalisme otoriter yang dianut Tiongkok saat ini dan menawarkan hal tersebut sebagai model untuk negara-negara lain yang ingin mempercepat pembangunan ekonomi serta menjaga kemerdekaan mereka (Brands, 2018).

Pada pihak India, mereka tidak pernah secara terbuka menyatakan perang ideologi perekonomian dengan Tiongkok. Akan tetapi, fakta yang menunjukkan bahwa ideologi perekonomian India dan Tiongkok berbeda membuat Tiongkok menjadi rival India pada regional Asia pada khususnya. Faktanya, pernyataan perang dari *Xi* terhadap ideologi perekonomian India tidak memiliki pengaruh terhadap konflik di Doklam. Maka dari itu, pada aspek kepentingan ideologi dirasa tidak cukup relevan untuk menggambarkan kepentingan India di Doklam.

## 1.6 Argumen Utama

Pada konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam, India memiliki dua kepentingan yang mengharuskan India terlibat secara langsung ke dalam konflik di Doklam. Pada kepentingan pertahanan dan keamanan, India berusaha mempertahankan stabilitas keamanan dan hegemoni di wilayah Bhutan dari ancaman Tiongkok. Sementara pada kepentingan ekonomi, India berusaha



mempertahankan pengaruh dan kerjasama ekonomi dengan Bhutan dari ancaman dan pengaruh Tiongkok.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka (Moleong, 2007).

### 1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2007)

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini bersifat *sekunder*. Data sekunder adalah dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan menggunakan data yang bersumber dari media massa, pendapat dan penelitian para pengamat, publikasi buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis, karya tulis ilmiah para ahli dan akademisi.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab pertama, penulis akan membahas tentang garis besar dari karya ilmiah ini. Garis besar yang dibahas meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Perkembangan konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam**

Pada bab kedua, penulis akan mendeskripsikan lebih lanjut tentang konflik yang terjadi di Doklam antara Tiongkok dan India. Kronologi akan dijelaskan lengkap mulai dari awal terciptanya konflik hingga memanasnya kembali konflik lama dari perbatasan tersebut.

### **BAB III: Ancaman Terhadap Kepentingan India**

Pada bab ketiga, penulis akan menganalisis ancaman terhadap kepentingan India dari perilaku agresif Tiongkok pada konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam

### **BAB IV: Kepentingan Pertahanan dan Ekonomi India di Doklam**

Pada bab keempat, penulis akan mengaitkan antara konflik yang terjadi di Doklam dengan kepentingan nasional India menurut klasifikasi teori kepentingan nasional dari Nuechterlein. Penjelasan tersebut akan memberikan gambaran yang jelas tentang kepentingan India untuk masuk ke dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam.

### **BAB V: Kesimpulan**

Pada bab kelima, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap konflik antara Tiongkok dan India di Doklam. Pada bab ini juga, penulis akan menjelaskan kepentingan India terhadap konflik di Doklam

## BAB II

### PERKEMBANGAN KONFLIK PERBATASAN DI DOKLAM

#### 2.1 Sejarah Konflik di Doklam

Doklam secara geografis terletak di Wilayah Himalaya yang mana daerah tersebut berbatasan langsung dengan Tiongkok dan Bhutan. Layaknya wilayah perbatasan pada umumnya, tensi ketegangan di Doklam ini cukup tinggi. Hal tersebut terjadi karena Tiongkok dan Bhutan sama-sama memperebutkan wilayah ini. Konflik antara Tiongkok dan Bhutan atas Wilayah Doklam itu bukan merupakan hal baru. Kedua negara tersebut telah bersitegang atas klaim dari Wilayah Doklam sejak lama. Akan tetapi, baik Tiongkok maupun Bhutan masih belum juga menemukan solusi atas Wilayah Doklam sendiri. Oleh karena itu, wilayah Doklam menjadi sebuah wilayah *status quo*. Menurut pernyataan resmi oleh Raja Bhutan kepada Majelis Nasional, ada empat wilayah yang disengketakan antara Bhutan dan Cina. Mulai dari Doklam di barat, perbatasan menyusuri pegunungan dari *Gamothen* ke *Batangla*, *Sinchela*, dan turun ke *Amo Chhu*. Area yang disengketakan di Doklam mencakup 89 kilometer persegi dan area yang disengketakan di *Sinchulumpa* dan *Gieu* mencakup sekitar 180 kilometer persegi (Ministry of Foreign Affair Royal Government of Bhutan, 2017).

Tiongkok dan Bhutan tercatat memiliki sejarah hubungan bilateral yang kurang harmonis, khususnya pada aspek batas negara. Secara historis, klaim Tiongkok untuk Bhutan benar-benar tergantung atas klaim Tibet. Oleh karena itu, sejarah hubungan Bhutan-Tibet ditempatkan pada tempat paling vital dalam kasus ini. Bhutan dan Tibet memiliki beberapa kesamaan pada budaya, sosial dan agama. Kesamaan tersebut tidak terjadi secara alami, akan tetapi memiliki sejarah yang panjang. Berdasarkan beberapa kesamaan tersebut, Tibet mengklaim bahwa Bhutan barat adalah wilayah kekuasaannya. Klaim kekuasaan Tibet atas Bhutan itulah yang menjadi landasan historis Tiongkok terhadap wilayah Doklam.

Klaim Tibet tersebut berawal pada awal abad ke-8, dimana tentara Tibet menyerbu dan berhasil menguasai lembah-lebah di Bhutan selatan. Penguasaan tersebut berlangsung cukup lama. Rentan waktu yang lama tersebut membuat

orang-orang Tibet menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Oleh karena itu, orang-orang asal Tibet menjadi dominan di Bhutan Barat. Masyarakat Tibet yang mayoritas beragama Budha tersebut juga perlahan menyebarkan agama pada keluarga dan orang-orang di Bhutan Barat lainnya. Migrasi tersebut sangat menentukan konversi masyarakat lokal Bhutan ke agama Buddha (Thierry, 2004). Oleh karena itu, Budha menjadi agama mayoritas dan masyarakat keturunan Tibet menjadi dominan di Bhutan Barat saat itu.

Akan tetapi, Tibet menarik pasukan militernya pada abad ke-9 dari Bhutan (Thierry, 2004). Penyebab dari penarikan pasukan tersebut masih belum diketahui kejelasannya. Penarikan pasukan militer Tibet tersebut ternyata tidak menyebabkan pengaruh Tibet di Bhutan lenyap. Rupanya, masyarakat Tibet yang mayoritas telah menganut agama Budha masih menjadikan Bhutan sebagai sarana spiritual. Oleh karena itu, masyarakat Tibet masih sering mengunjungi Bhutan dan lalu lintas mereka masih intensif disana.

Munculnya British East India Company di perbatasan selatan Bhutan pada di pertengahan abad ke-18 menciptakan situasi baru pada skema hubungan Tibet dan Bhutan. Terlebih, Bhutan telah mengakui kemenangan pihak Inggris setelah kekalahan mereka dalam perang Anglo-Bhutan atas Kuch Bihar pada tahun 1772-1773 (Sarkar T. , 2017). Peristiwa tersebut memaksa Bhutan harus jatuh ke tangan Inggris. Sebagai pemenang, Inggris berhak menguasai Bhutan. Inggris memberikan regulasi yang cukup mengikat bagi Bhutan. Salah satu ikatan tersebut terletak pada Hubungan luar negeri Bhutan. Bhutan harus mengonsolidasikan keinginannya pada Inggris setiap mereka akan bertindak dalam hubungan luar negeri mereka. Akan tetapi, hubungan antara Bhutan dengan Tibet masih terus berlanjut di Bhutan Barat. Mereka menjalin hubungan dibawah pengaruh Inggris baik di Lhasa maupun Punakha.

Penguasa Tibet menganggap Bhutan sebagai pengikut di balik pengaruh kepercayaan mereka. Di lain sisi, Bhutan terkadang pura-pura menerima situasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Bhutan dengan tujuan untuk mengecilkan pengaruh Inggris di negarnya. Sebagai contoh, Pada tahun 1946, Raja Bhutan pernah menulis surat kepada Raja Muda dan Gubernur Jenderal India bahwa

Bhutan sangat dekat dengan Tibet dan mereka telah "mengakui kedaulatan dan pengaruh Tibet" di negaranya (Thierry, 2004). Pembayaran tahunan Bhutan ke Tibet merupakan sebuah bukti yang dapat mengkonfirmasi bahwa Bhutan mengakui kekuasaan Tibet atas negara mereka.

Pada akhir abad ke-18, strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia mulai terlihat. Orang-orang Tiongkok pada periode tersebut mulai masuk dan memberikan pengaruh yang dominan terhadap Bhutan. Terlebih, Tiongkok dalam perluasan pengaruh di Asia harus melawan Inggris. Tiongkok dengan pergerakannya menuju Tibet, serta *British East India Company* berada di Timur Laut India (Thierry, 2004). Kedua kekuatan besar tersebut tentunya semakin menghimpit dan menjadi ancaman bagi Bhutan yang secara geografis berada di tengah-tengah kedua negara tersebut. Oleh karena itu, Bhutan merasakan kekuatiran atas keberlangsungan negaranya.

Hubungan Bhutan dengan Tiongkok dimulai setelah berdirinya *Cina Ambans* (penduduk) di *Lhasa* pada abad ke-18 di bawah *Dinasti Qing*. Sumber-sumber Tiongkok cenderung menunjukkan bahwa Bhutan adalah pengikut dari Tiongkok (Thierry, 2004). Asumsi ini didasarkan pada dugaan *suzerainty* dari penguasa Tibet di Bhutan yang diteruskan ke Tiongkok. *Suzerainty* adalah keadaan atau situasi ketika suatu kerajaan komunitas, atau wilayah negara merupakan jajahan suatu entitas yang lebih besar dan kuat. Pada abad ke-18 dan 19, Kaisar Tiongkok memberikan kantor pada berbagai pejabat Bhutan. Perwakilan Bhutan ditempatkan di *Lhasa*. Mereka secara teratur memiliki agenda bertemu dengan orang Tibet dan pejabat Tiongkok. Pertukaran agen antara Bhutan dan Tiongkok yang mulai intens pada saat itu dimanfaatkan oleh Tiongkok yang kemudian mengumumkan secara teratur bahwa Nepal, Sikkim, Tibet dan Bhutan merupakan bagian dari kekaisaran Tiongkok (Savada, 1993).

Pada periode selanjutnya, Tiongkok perlahan memulai menjalin hubungan yang harmonis dengan Bhutan. Pada tahun 1930, *Mao Zedong* telah resmi mengumumkan secara terbuka bahwa batas-batas Tiongkok adalah mencakup Burma, Bhutan, Nepal, Taiwan, Korea dan Pulau Ryukyu. Pernyataan ini terkandung dalam aslinya versi Revolusi Tiongkok dan Partai Komunis. Akan

tetapi, pernyataan tersebut ternyata telah dihapus dari versi buku yang lebih baru dengan maksud untuk menghindari kecurigaan di benak para pemimpin negara-negara tersebut. Tiongkok mungkin telah tertarik untuk memperluas pengaruhnya di wilayah selatan Himalaya, akan tetapi mereka juga secara diam-diam mendukung pembentukan kembali “Federasi Himalaya” yang didalamnya mencakup Nepal, Sikkim dan Bhutan (Thierry, 2004).

Pada tahun 1947, India memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Oleh karena itu, *Perjanjian Punakha* yang dahulunya merupakan perjanjian kemenangan Inggris atas Bhutan dalam perang Anglo-Bhutan kini secara tidak langsung beralih tangan ke India . Dua tahun pasca kemerdekaan India, mereka dengan cepat menutup lubang yang ditinggalkan Inggris di Bhutan. India melakukan perjanjian perdamaian dan persahabatan, yang menetapkan bahwa India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Bhutan. Akan tetapi, India akan membimbing Bhutan pada kebijakan luar negerinya (Thierry, 2004). Selebihnya, Bhutan cenderung memilih mengisolasi negaranya dari pengaruh dua negara besar yang mengapitnya, baik Tiongkok maupun India. Perjanjian tersebut kini menjadi landasan fundamental campur tangan India terhadap apapun kebijakan luar negeri Bhutan.

Tiongkok yang sepenuhnya sadar akan peristiwa tersebut mengambil langkah untuk mengurangi intensitas Bhutan dengan India. Salah satu strategi Tiongkok dalam mengurangi hegemoni India di Bhutan adalah memperlakukan Bhutan sebagai sebuah negara merdeka. Pada tahun 1953, Tiongkok mengirim hadiah ke *Druk Gyalpo* (Raja Bhutan). Selain itu, contoh nyata datang dari Tiongkok yang mana mereka memutuskan untuk mengeluarkan visa langsung terhadap warga negara Bhutan. Bhutan juga tertarik oleh perilaku baik dari Tiongkok. Tetapi Pemerintah Kerajaan Bhutan (RGOB) tidak pernah mengambil inisiatif khusus tentang hubungannya dengan Tiongkok (Sarkar R. , 2007).

Pecahnya pemberontakan terhadap Tiongkok di Tibet pada tahun 1954-1955 memiliki dampak secara langsung terhadap hubungan Tiongkok dan Bhutan. Tibet yang saat itu memberontak terhadap Tiongkok ketika revolusi anti-Tiongkok dan anti-Komunis meletus di *Lhasa*, ibukota Tibet. Konflik tersebut

meletus sejak Partai Komunis Tiongkok menguasai wilayah tersebut pada tahun 1950. Berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Tibet, India memiliki sebuah celah yang mana mereka memanfaatkan ketakutan serta kegelisahan Bhutan atas dominasi dan aneksasi yang dilakukan Tiongkok terhadap Nepal (Pranav, 2010). India seakan kurang puas dengan kerjasama yang ada dengan Bhutan sekarang. India ingin negaranya memiliki kerjasama yang lebih banyak dengan Bhutan. Pada akhirnya, mereka membujuk Bhutan agar tidak lagi menjadi negara yang tertutup. Bhutan memang perlu merasa kuatir atas perilaku agresif Tiongkok, khususnya di wilayah perbatasan. Strategi Tiongkok yang menuai perlawanan dari Tibet mengisyaratkan bahwa betapa seriusnya Tiongkok dalam menguasai negara-negara Asia.

Salah satu kubu pemberontak *Khampa* ditemukan di daerah *Tsona*, di Tibet tengah yang notabene cukup dekat dari perbatasan Bhutan (Pranav, 2010). Peristiwa tersebut kemudian memutuskan *Nehru* untuk melakukan kunjungan kerja ke Bhutan pada bulan September 1958. Inti dari kunjungan tersebut adalah untuk meyakinkan Pemerintah Bhutan untuk mengakhiri kebijakan isolasi negara Bhutan. India bahkan telah menawarkan rancangan pembangunan jalan strategis antara India dan Bhutan yang memang menjadi salah satu prioritas di wilayah tersebut (Thierry, 2004). Meskipun ada keprihatinan dari Bhutan atas situasi di Tibet, Bhutan tetap memilih berhati-hati dalam setiap kebijakannya agar mereka tidak terseret ke dalam konfrontasi tetangga-tetangga besar mereka, yakni Tiongkok dan India. Akibatnya Bhutan memilih kebijakan “tunggu-dan-lihat”. Akan tetapi melihat situasi yang semakin memburuk di Tibet, Bhutan menjadi semakin sulit untuk menolak permintaan kerjasama dari India.

Perilaku agresif Tiongkok semakin hari semakin meningkat, khususnya di wilayah sekitar perbatasan Tiongkok sendiri. Pada akhir 1960 penjaga perbatasan Tiongkok dilaporkan melakukan patroli di sepanjang perbatasan wilayahnya dengan Bhutan (Sarkar R. , 2007). Beberapa dari mereka bahkan membuat serbuan berskala kecil ke wilayah Bhutan. Meskipun serangan ini tidak mengandung dan menggunakan militer dari Tiongkok, akan tetapi hal tersebut

menunjukkan ketidakpastian terhadap lokasi perbatasan yang sebenarnya antara Tiongkok dan Bhutan serta membuat ketakutan terhadap Bhutan sendiri.



Gambar 2.1

Klaim peta oleh Tiongkok

(Sumber: [www.globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org))

Puncaknya terjadi pada tahun 1961. Tiongkok menerbitkan sebuah peta baru yang mengundang kontroversi dimana pada peta tersebut menggambarkan perbatasan Tiongkok pada sepanjang wilayah Himalaya menunjukkan adanya beberapa perbedaan dengan apa yang telah mereka sepakati dengan Bhutan sebelumnya. Hal tersebut tentu sarat akan konflik. Peta yang kontroversial dari Tiongkok tersebut dipublikasikan pada bulan Juli 1958 di majalah *Pictorial Tiongkok* (Thierry, 2004). Pada peta tersebut, Tiongkok menggambarkan bahwa traktat besar wilayah Bhutan - seluruh wilayah *Trashigang* di bagian timur dan sebagian besar wilayah di Timur Laut – kedalam wilayah teritorial Tiongkok. Perbedaan ini tentunya mendapat sorotan dari Bhutan dan India. India yang merasa cemas akan perilaku Tiongkok tersebut mendorong Bhutan agar negaranya lebih terbuka, khususnya terhadap kerjasama dengan India.

Melihat perilaku Tiongkok tersebut, Bhutan akhirnya memilih untuk lebih terbuka pada India. Mereka menerima berbagai perjanjian yang pernah ditawarkan oleh India. Perjanjian tersebut termasuk pada perjanjian ekonomi antara kedua



negara, hingga perencanaan proyek jalan utama yang menghubungkan India ke Bhutan pusat. Selain itu, Bhutan juga mempercayakan dan menyerahkan tanggung jawab untuk melatih tentara nasional mereka pada India. Bhutan melakukan hal tersebut didasari pada kekuatiran mereka atas invansi dan konflik dengan Tiongkok yang mulai terlihat lebih agresif di wilayah perbatasan mereka sendiri.

Di sisi lain, pada tahun 1960, Bhutan juga memutuskan untuk melarang semua perdagangannya dengan Tibet. Bhutan juga menarik wakilnya atas Tibet di *Lhasa*, serta perwiranya di Tibet Barat. Tindakan Bhutan tersebut terhitung memiliki nilai konsekuensi yang tinggi. Pelarangan hubungan dagang dengan Tibet tersebut membuat perekonomian Bhutan melemah. Bhutan memang telah lama bergantung pada pasar Tibet. Mereka menyuplai beras dan kain tenun ke Tibet. Oleh karena itu, perekonomian Bhutan saat itu mulai beralih ke India seiring dengan pembukaan jalan raya menuju India pada tahun 1963 (Sarkar R. , 2007).

Kaburnya patokan-patokan batas wilayah antara Tiongkok dan Bhutan menjadi problem serius hingga sekarang. Tiongkok telah mengeluarkan batas baru yang berlandaskan sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah ketika Bhutan mengakui bahwa Bhutan Barat memang masuk ke dalam kekuasaan Tibet. Sebagai buktinya, mereka harus membayar pajak tahunan ke Tibet yang semakin menguatkan kekuasaan Tibet atas sebagian wilayah Bhutan di bagian barat. Sementara itu, batas dari wilayah Tibet kini menjadi klaim dari batas wilayah dari Tiongkok. Klaim tersebut ada berdasarkan pada “Konvensi Anglo-Cina” pada tahun 1890 yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris di India dan Kerajaan Tiongkok. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 1, batas Sikkim dan Tibet didefinisikan sebagai puncak pegunungan yang memisahkan air yang mengalir ke Sungai Teesta di Sikkim dan anak-anak sungainya dari perairan yang mengalir ke Sungai Mochu Tibet dan ke utara ke sungai-sungai lain di Tibet. Garis dimulai di Gunung Gipmochi di perbatasan Bhutan, dan mengikuti daerah aliran sungai di atas ke titik di mana ia bertemu wilayah Nepal (Convention between Great Britain and China relating to Sikkim and Tibet, 1890).

Tiongkok menegaskan bahwa dengan Konvensi ini, titik awal perbatasan Sikkim-Tibet adalah "Gunung Gipmochi" di perbatasan Bhutan dan bahwa ini dengan jelas menentukan titik persimpangan. Sesuai klaim Tiongkok, Doklam terletak di daerah *Xigaze* di Tibet, serta berbatasan dengan negara bagian Sikkim. Konvensi itulah yang digunakan Tiongkok sebagai dasar untuk klaim sebagian wilayah di Doklam yang masih jadi kontroversi hingga sekarang

Sementara itu, Bhutan yang merasa negaranya tidak cukup kuat untuk melawan negara sekelas dan sebesar Tiongkok, mereka akhirnya memilih untuk membuka diri dengan India. Beberapa perjanjian dengan India akhirnya disepakati termasuk pada bimbingan terhadap kebijakan luar negeri hingga bimbingan dan pelatihan militer Bhutan oleh India (Sarkar R. , 2007). Akan tetapi perjanjian dengan India tersebut masih belum memiliki dampak dengan konflik perbatasan Bhutan dengan Tiongkok. Bhutan harus menyelesaikan masalah yang sangat praktis dengan Tiongkok.

Pertama adalah masalah yang terkait dengan formalitas atas perbatasan 200 mil Tiongkok-Bhutan. Batas tersebut memang tidak pernah secara resmi dibatasi di masa lalu. Pejabat dan masyarakat setempat hanya berpatokan pada pemahaman umum yang sudah jelas, yang mana batasnya merupakan wilayah yang berdekatan dengan lintasan utama yang digunakan aktifitas oleh pedagang tradisional. Sisa perbatasan itu sebagian besar tidak diketahui dan tidak ada yang menyatakan minat untuk demarkasi yurisdiksi teritorial sebelum 1959 (Thierry, 2004). Oleh karena itu, konflik Tiongkok dengan Bhutan pada wilayah perbatasan merupakan konflik yang cukup lama dan masih belum menemukan solusi hingga saat ini.

## **2.2 Fluktuasi Konflik perbatasan antara Tiongkok-Bhutan**

Bhutan yang perilakunya cenderung berhati-hati saat itu kini mulai memiliki sehelai nafas untuk menormalkan hubungan mereka dengan Tiongkok. Keterikatan hubungan antara Bhutan dan India melalui perjanjian persahabatan tersebut telah menempatkan kebijakan luar negeri Bhutan harus berada di bawah bimbingan India. Oleh karena itu, normalisasi hubungan Bhutan-Tiongkok tidak

semudah apa yang dibayangkan. Bhutan harus tetap menyesuaikan dan melihat hubungan bilateral Tiongkok-India sebagai dasar dari kebijakan luar negerinya. Akan tetapi, sebuah sebuah wacana tentang normalisasi hubungan Tiongkok-India mulai berhembus. Pada tahun 1979, sebuah sinyal pertama dan positif datang ketika pemerintah India, mempromosikan kebijakan bilateralisme yang menguntungkan dimana jalan untuk menormalkan hubungan antara Tiongkok dan India terbuka lebar (Thierry, 2004). Peristiwa tersebut berkaitan dengan para anggota Majelis Nasional di Thimphu yang memohon pembentukan kontak langsung dengan Tiongkok. Permintaan mereka tidak terinspirasi oleh stand pro-Tiongkok. Akan tetapi, permintaan tersebut termotivasi oleh pertumbuhan jumlah insiden penggembalaan di perbatasan Tiongkok-Bhutan yang mana banyak penggembala Bhutan yang terkadang diserang oleh Tibet.

Tahun 1979, intrusi ditemukan pada skala yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kebutuhan untuk bernegosiasi menjadi sebuah hal yang mendesak. Tepat pada tahun itu, Para pemimpin Bhutan dan Tiongkok mulai bertukar pesan ucapan pada setiap hari nasional mereka masing-masing. Praktik tersebut menggambarkan sebuah langkah baru dalam hubungan Bhutan-Tiongkok. Bhutan tidak menganggap bahwa langkahnya untuk berinteraksi dengan Tiongkok harus dibawah persetujuan otorisasi resmi India, akan tetapi mereka hanya memandang India sebagai pembimbing dalam kebijakan luar negerinya (Thierry, 2004). Oleh karena itu, Bhutan hanya memberi tahu kepada India bahwa mereka telah memulai sebuah langkah interaksi langsung dan berdiskusi tentang masalah perbatasan dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Bhutan, *Lyonpo* adalah orang pertama yang melakukan dan mengumumkan secara resmi tentang interaksi Bhutan-Tiongkok tersebut (Thierry, 2004).

Semenjak pertemuan dan pengumuman resmi pertama tersebut, interaksi antara Bhutan dan Tiongkok menjadi semakin intensif. Pada 1983, anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok *Wu Xueqian* dan Menteri Luar Negeri Bhutan *Dawa Tsering* bertemu di New York (Joshi, 2017). Mereka mengadakan konsultasi tentang pengembangan hubungan bilateral antara Bhutan dan Tiongkok, khususnya mengenai perbatasan wilayah kedua negara tersebut.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara Bhutan dan Tiongkok untuk mengadakan pertemuan tahunan guna membahas masalah perbatasan tersebut. Hasil tersebut tentu memiliki nilai positif bagi Bhutan yang ingin menormalkan hubungan mereka dengan Tiongkok. Mereka berharap bahwa hubungan antara Tiongkok dan Bhutan semakin membaik seiring dengan komunikasi yang intensif oleh kedua negara terkait.

Putaran pertama pembicaraan mengenai batas-batas wilayah antara Tiongkok dan Bhutan diadakan di Beijing pada April 1984. Agenda tersebut terus berjalan dan rutin diadakan setiap tahun. Mulai dari tahun 1984 hingga 2002, Bhutan dan Tiongkok telah melakukan pertemuan rutin sebanyak enam belas kali yang diselenggarakan secara bergantian di Beijing dan di Thimpu (Thierry, 2004). Dari perundingan putaran pertama sampai kelima, Delegasi Bhutan dipimpin oleh duta besar mereka di New Delhi, sedangkan Delegasi Tiongkok dipimpin oleh seorang Wakil Menteri Luar Negeri. Kemudian tingkat pembicaraan mulai meningkat saat berlangsungnya putaran ke-enam pada tahun 1989 (Joshi, 2017). Kedua negara baik Tiongkok maupun Bhutan dipimpin oleh perwakilan dari kementerian luar negeri mereka. Pihak Bhutan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri mereka, serta pihak Tiongkok dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Senior. Kedua negara, baik Bhutan maupun Tiongkok sama-sama menunjukkan keseriusan mereka dalam menormalkan hubungan keduanya. Keseriusan tersebut terlihat dari sebuah fenomena ketika di Thimphu. Delegasi Tiongkok diberikan sebuah audiensi dengan Raja Bhutan. Sementara, pihak Tiongkok membalasnya dengan memberikan kesempatan bagi delegasi Bhutan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok.

Selama sepuluh putaran pembicaraan pertama yang dimulai pada tahun 1984, kedua belah pihak baik Tiongkok maupun Bhutan telah mencapai konsensus pada “prinsip - prinsip pedoman di penyelesaian masalah batas dan mempersempit perbedaan mereka” (Thierry, 2004). Di 1996, survei Bhutan melaporkan bahwa Tiongkok sedang membangun jalan dan memulai operasi penebangan di daerah yang sedang dirundingkan antara Tiongkok dan Bhutan. Melihat fenomena tersebut, Bhutan menyatakan keprihatinannya atas perilaku

Tiongkok ini pada saat terjadinya perundingan putaran ke-sebelas yang diselenggarakan di Beijing pada tahun 1996 (Joshi, 2017). Melihat keprihatinan Bhutan atas fenomena tersebut, Tiongkok saat itu mengusulkan agar kedua belah pihak, baik Tiongkok maupun Bhutan untuk menandatangani sebuah perjanjian persahabatan antara mereka. Akan tetapi karena delegasi Bhutan tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, perjanjian tersebut ditunda ke putaran pembicaraan berikutnya yang dilaksanakan di Beijing pada tanggal 8 Desember 1998 (Bhutan News Online, 2004).

Pada pertemuan yang telah disepakati tersebut, Bhutan dan Tiongkok resmi menandatangani “Perjanjian Pemeliharaan Perdamaian dan Ketenangan di Wilayah Perbatasan Bhutan-Tiongkok” (Bhutan News Online, 2004). Peristiwa ini merupakan langkah penting bagi kedua negara, tidak hanya untuk membahas masalah perbatasan mereka, akan tetapi juga untuk menjalin hubungan global antara Tiongkok dan Bhutan. Perjanjian tersebut adalah perjanjian resmi pertama yang ditandatangani oleh pemerintah keduanya. Menurut perjanjian tersebut, Tiongkok dan Bhutan bersepakat bahwa sebelum solusi akhir dari masalah batas, “*status quo*” perjanjian antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Bhutan tentang Pemeliharaan Perdamaian dan Ketenangan Sepanjang Daerah Perbatasan Tiongkok-Bhutan Daerah Perbatasan” harus ditegakkan. Perjanjian tersebut terhitung mulai tanggal 8 Desember 1998 (Bhutan News Online, 2004). Tiongkok menegaskan kembali bahwa mereka menghormati sepenuhnya kemerdekaan, kedaulatan, dan teritorial integritas Bhutan. Kedua belah pihak siap untuk mengembangkan hubungan kerja sama mereka yang ramah dan ramah berdasarkan “Kelima Prinsip-prinsip Keberadaan Bersama yang Damai.” Lima prinsip tersebut yaitu saling menghormati integritas dan kedaulatan wilayah masing-masing, saling tidak agresif, saling tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing, kesetaraan dan kerjasama untuk saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai (Bhutan News Online, 2004). Kesepakatan ini nampaknya menimbulkan ketidaknyamanan bagi India. Hal tersebut tercermin pada komentar pada sarjana India yang menyampaikan protes pada Bhutan. Mereka mengatajan bahwa kesepakatan ini adalah

“permainan kartu Tiongkok melawan India”, akan tetapi kemudian kesepakatan ini terus berjalan tanpa menghiraukan kritik dari pihak India tersebut.

Perundingan tahunan antara Tiongkok dan Bhutan tersebut memiliki tujuan utama yang jelas, yakni untuk menemukan solusi untuk masalah perbatasan. Pembahasan dari setiap perundingan adalah untuk mencari titik temu di wilayah yang disengketakan. Wilayah tersebut diidentifikasi meliputi area seluas 600 kilometer persegi, yang terletak di timur laut Bhutan di sepanjang garis *Mac-Mahon*. Wilayah tersebut juga termasuk area *Tashigang* dan “26 kantong lain” yang diidentifikasi terletak pada sembilan nama desa yang terletak di barat *Nyamjang Chhu* yang meliputi *Khangri*, *Tarcheng*, *Checkar*, *Jangtong*, *Tussu*, *Janghi*, *Dirafoo*, *Chakop*, dan *Kachan* (Thierry, 2004). Tingkat persisnya wilayah yang disengketakan antara Tiongkok dan Bhutan belum dipublikasikan secara resmi.

Pada tahun 2002, informasi terperinci telah dirilis melalui debat di Kebaktian Nasional di Thimphu. Menurut debat yang diselenggarakan pada bulan Juli 2002 tersebut, ada empat daerah yang disengketakan antara Tiongkok dan Bhutan. Wilayah tersebut meliputi Doklam dan melewati sepanjang punggung gunung dari *Gamothen* ke *Batangla*, *Sinchela*, dan turun ke *Amo Chhu*. Lebih rincinya, wilayah Doklam yang dipersengketakan antara Tiongkok dan Bhutan tersebut diidentifikasi memiliki luas 89 kilometer persegi. Sementara daerah yang disengketakan di *Sinchulumpa* dan *Gieu* mencakup sekitar 180 km persegi (Joshi, 2017).

Untuk sementara sebelum adanya solusi dari kedua negara mengenai perbatasan wilayah tersebut, kedua negara nampaknya menarik sebuah garis batas yang mana berdasarkan aktifitas masyarakat tradisional setempat. Garis batas tersebut dimulai dari *Langmarpo Zam* dan berjalan di sepanjang aliran ke *Docherimchang* yang kemudian naik punggung ke *Gomla* dan kemudian mengalir sepanjang punggung ke *Pangkala* hingga kemudian turun ke aliran *Dramana*. Dari *Dramana*, batas berjalan hingga *Zingula* serta kemudian mengikuti garis punggung ke *Gieu Chhu* yang akhirnya pergi dan mengarah ke *Lungkala*. Di sektor menengah di *Pasamlum*, garis batas tersebut ditarik

menyusuri punggungan ke *Dompala* dan ke *Neula*. Dari *Neula*, batas mengikuti garis punggungan ke *Kuricchu Tshozam*, dan kemudian mengikuti garis punggungan ke *Genla* yang kemudian mengarah pada daerah *Mela* dan selanjutnya mengarah ke timur (Thierry, 2004).

Perundingan tahunan antara Tiongkok dan Bhutan tersebut setidaknya membuahkan beberapa hasil yang konkrit seperti “Perjanjian Pemeliharaan Perdamaian dan Ketenangan di Wilayah Perbatasan Bhutan-Tiongkok”, penarikan garis batas sementara kedua negara pada tahun 1998, serta penyusutan wilayah yang dipersengketakan kedua belah pihak. Sebagai hasil dari pembicaraan, wilayah yang disengketakan telah berkurang dari 1.128 km persegi menjadi 269 km persegi di tiga area di bagian barat laut Bhutan. Penyusutan yang signifikan tersebut menandakan bahwa normalisasi hubungan antara Tiongkok dan Bhutan hampir pada tahapan titik temu.

Meskipun perundingan tersebut mengalami peningkatan yang cukup pesat, Bhutan masih belum mau mempercepat kesimpulan negoisasi batas wilayah yang dipersengketakan oleh Tiongkok dan Bhutan. Perilaku Bhutan yang seolah enggan untuk segera memberikan kesimpulan negosiasi tersebut terlihat pada saat pertemuan tahunan Tiongkok-Bhutan putaran ke-empatbelas yang diadakan di Beijing pada bulan November 2000. Bhutan memperluas garis klaim perbatasan melampaui apa yang dulu pernah ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok. Usulan perpanjangan perbatasan tersebut meliputi tiga sektor. Adapun ketiga sektor yang dibahas adalah di *Doklam*, *Sinchulumba* dan daerah *Dramana* (Joshi, 2017). Bhutan merasa bahwa kesepakatan sebelumnya tidak dapat diterima Bhutan dan mereka merasa bahwa harus dilakukan beberapa perubahan terkait klaim tersebut.

Perundingan putaran berikutnya atau putarak ke-limabelas diadakan di Thimphu pada Desember 2001. Saat itu, negosiator Tiongkok adalah Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, *Wang Yi* mengatakan bahwa “"masalah batas telah, pada umumnya, diselesaikan". Sementara itu di pihak Bhutan menyebut hal tersebut merupakan "kemajuan yang berarti". Bhutan tidak lagi mengangkat masalah pada pertemuan ke-empatbelas yang mana mereka merasa perlu

memperpanjang perbatasan di tiga sektor, yakni *Doklam*, *Sinchulumba* dan daerah *Dramana*. Oleh karena itu, pada akhir 2001 tersebut dapat ditarik dan diakui secara umum diskusi hampir berakhir dengan resolusi (Thierry, 2004).

Pada perundingan putaran berikutnya yang diselenggarakan pada Bulan Juli 2002, Menteri Luar Negeri Bhutan *Lyonpo Jigmi Y. Thinley* kembali mengulas masalah permintaan perpanjangan perbatasan Bhutan kepada Tiongkok. Beliau memberi pernyataan bahwa:

“Bhutan telah mempercayai Tiongkok memiliki bukti dokumenter tentang kepemilikan traktat yang disengketakan tanah. Akan tetapi ketika Bhutan meminta mereka untuk bermurah hati dengan tetangga kecil seperti mereka, mereka selalu mempersulitnya. Tiongkok sebagai sebuah negara yang berbagi perbatasan dengan 25 negara-negara lain mereka tidak mampu untuk bermurah hati dengan satu negara tetangga mereka (Lyonpo, 2002).”

Pernyataan tersebut tentunya membuat Pemerintah Tiongkok, termasuk Perdana Menteri, tidak senang. Beliau justru mempertanyakan mengapa Bhutan mengikat masalah baru setelah sekian tahun secara intensif dan rutin membicarakan masalah tersebut. Bahkan, mereka mengangkat masalah baru ini ketika sinyal normalisasi hubungan Tiongkok-Bhutan sedang di akhir tahapan.

Setelah pembicaraan putaran ke-16, pihak Bhutan mengakui bahwa “pokok bahasannya agak rumit, sehingga kedua belah pihak akan terus bekerja untuk menemukan solusi.” Oleh karena itu, kedua belah pihak bersepakat untuk membawa ahli teknis dalam memutuskan bagian mana dari wilayah tersebut yang milik Bhutan dan bagian mana yang dimiliki oleh Tiongkok. Kesepakatan tersebut juga nantinya akan digunakan untuk menggambarkan klaim pada peta. Pada kasus ini, kedua belah pihak memutuskan untuk menggunakan nama umum dari daerah yang disengketakan untuk menghindari kebingungan. Selanjutnya, implementasi dari kesepakatan tersebut terlihat pada pertemuan berikutnya yang diadakan pada bulan Juni 2002. Pada saat itu, Sekretaris Dalam Negeri Bhutan memimpin tim ahli mereka ke Tiongkok untuk pertama kali melakukan pertemuan kelompok ahli dengan Tiongkok.



Enam belas putaran perundingan antara Tiongkok dan Bhutan sejauh ini telah membuktikan bahwa mereka mampu berurusan dengan hubungan yang lebih matang dari sebelumnya. Kontak resmi antara kedua negara telah tumbuh baik secara langsung maupun saluran multilateral. Kedua negara telah menggunakan laporan konsultasi tahunan untuk bertukar pandangan tentang cara memperluas hubungan bilateral. Otoritas Tiongkok telah secara teratur menguraikan prinsip dasar kebijakan mereka terhadap Bhutan, dan menyatakan bahwa “Tiongkok menghargai persahabatan tradisional antara dua orang yang menempel penting pada hubungan persahabatan antara kedua negara, yakni Tiongkok dan Bhutan.

Tiongkok juga menegaskan bahwa mereka menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Bhutan, dan menganut prinsip non-interferensi dalam urusan internal Bhutan. Tiongkok juga berharap untuk secara bertahap meningkatkan kontak bilateral, dan menyambut teman-teman Bhutan untuk melakukan bisnis, melakukan pengamatan, atau sekedar berziarah di Tiongkok. Meskipun terbatas, hubungan keduanya telah berkembang. Mulai dari tahun 1994, duta besar Tiongkok di India secara teratur melakukan kunjungan kerja ke Bhutan dan bertukar pandangan dengan Raja dan Menteri Luar Negeri Bhutan untuk lebih mengembangkan hubungan bilateral keduanya. Pada Juni 2000, Duta Besar Bhutan untuk India juga mengunjungi Tiongkok. Kunjungan ini telah membuka yang baru saluran kontak selain pembicaraan masalah perbatasan seperti masalah agama, budaya, bidang politik dan teknis.

Melihat beberapa fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka konflik antara Tiongkok dan Bhutan sedikit demi sedikit mulai membaik. Kesepakatan demi kesepakatan mulai terbentuk, khususnya permasalahan di bidang perbatasan kedua negara yang secara signifikan mulai menemukan satu titik terang. Intensitas pertemuan mereka yang diwadahi dalam pertemuan rutin tahunan Tiongkok-Bhutan bahkan semakin mendekatkan kedua negara tersebut. Mereka tidak hanya membahas masalah konflik perbatasan, akan tetapi juga perlahan mulai membenahi hubungan bilateral Tiongkok-Bhutan.

### 2.3 Memanasnya Konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam pasca keterlibatan India

Konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan, khususnya di daerah Doklam yang dirasa hampir menemukan titik temu kini kembali memanas. Peristiwa tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah terjadi peristiwa pembangunan jalan raya oleh Tiongkok serta pemblokiran tentara India atas pembangunan jalan raya tersebut pada tanggal 18 Juni 2017 (The Straits Times, 2017). Aktivitas pembangunan jalan rayatersebut berada di daerahh Sinchela. Proyek jalan raya oleh Tiongkok tersebut terhenti ketika mereka tiba-tiba dihadapkan pada tentara India yang datang dari Bhutan dan kemudian memblokir pembangunan jalan tersebut. Alhasil, ketegangan antara Tiongkok dan India pecah di Doklam. Kedua negara sama-sama mempermasalahkan peristiwa tersebut, baik di kancah regional maupun internasional.

Mega proyek pembangunan jalan raya oleh Tiongkok tersebut dilaksanakan sejak tanggal 16 Juni 2017 lalu (Apdf Magazine, 2017). Rute pembangunan jalan raya tersebut bermula dari daerah *Yadong* dan menuju ke daerah *Doka La* yang mana berjarak sekitar dua kilometer dari markas angkatan darat Bhutan di *Zompelri* (Apdf Magazine, 2017). Daerah tersebut masih masuk dalam wilayah Doklam yang masih disengketakan oleh Tiongkok dan Bhutan. Aktifitas Tiongkok yang agresif di wilayah sengketa tersebut dianggap India sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan Doklam. Oleh karena fenomena tersebut, India langsung mengambil tindakan tegas atas perilaku Tiongkok tersebut dengan melakukan penghadangan serta pemblokiran proyek pembangunan jalan raya tersebut pada tanggal 18 Juni 2017.

Wilayah Dataran Tinggi Doklam ini memang masih belum jelas kepemilikannya. Tiongkok dan Bhutan masih mencoba bernegosiasi tentang wilayah perbatasan kedua negara, khususnya di wilayah Doklam ini. Tiongkok mengklaim Doklam sebagai wilayah teritorial mereka berdasarkan klaim kepemilikan atas wilayah Tibet serta “Konvensi Anglo-Cina” tahun 1890. Setelah Tibet berhasil dikalahkan Kerajaan Tiongkok, maka Tibet secara resmi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tiongkok serta wilayah kekuasaannya juga beralih

menjadi wilayah Tiongkok. Sementara itu, “Konvensi Anglo-Cina” tahun 1890 dianggap Tiongkok telah mampu merepresentasikan wilayah yang menjadi batas dari kekuasaan Tibet pada saat itu. Pada “Konvensi Anglo-Cina” tahun 1890 tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 1, batas Sikkim dan Tibet didefinisikan sebagai puncak pegunungan yang memisahkan air yang mengalir ke Sungai Teesta di Sikkim dan anak-anak sungainya dari perairan yang mengalir ke Sungai Mochu Tibet dan ke utara ke sungai-sungai lain di Tibet. Garis dimulai di Gunung Gipmochi di perbatasan Bhutan, dan mengikuti daerah aliran sungai di atas ke titik di mana ia bertemu wilayah Nepal (Convention between Great Britain and China relating to Sikkim and Tibet, 1890).

Pernyataan dari konvensi tersebut kini menjadi landasan dasar bagi Tiongkok untuk klaimnya atas wilayah Doklam. Tiongkok menegaskan bahwa dengan Konvensi ini, titik awal perbatasan Sikkim-Tibet adalah “Gunung Gipmochi” dan bahwa ini dengan jelas menentukan titik persimpangan. Sesuai klaim Tiongkok, Doklam terletak di daerah *Xigaze* di Tibet serta berbatasan dengan negara bagian Sikkim. Oleh karena itu, Tiongkok justru sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka menganggap proyek pembangunan jalan tersebut masih dalam batas wilayah negaranya. Tiongkok juga menambahkan argumen bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, baik terhadap Bhutan maupun India. “Itu adalah fakta yang tak terbantahkan yang didukung oleh bukti historis dan yurisprudensi,” kata juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok *Lu Kang* (Tirto, 2017). Tiongkok justru balik mempertanyakan tentang adanya pasukan militer India di daerah tersebut. Mereka beranggapan bahwa seharusnya India tidak harus memiliki masalah dengan pembangunan yang dilakukan Tiongkok tersebut, karena pembangunan tersebut tidak menjamah wilayah India sedikitpun (Apdf Magazine, 2017).

Selanjutnya, ketegangan antara Tiongkok dan India pada konflik di Doklam semakin memanas. India melalui Menteri Luar Negerinya merilis pernyataan pada situs resmi Kementerian Luar Negeri India yang berjudul “*Recent Development in Doklam Area Stating its official position*” (Ministry of External Affairs Government of India, 2017). Pada pernyataan tersebut, India

dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tiongkok telah merubah *status quo* daerah konflik yang telah disepakati diantara Tiongkok dan Bhutan. India juga menyatakan bahwa pembangunan tersebut sangat mengancam stabilitas keamanan daerah tersebut. Mereka bersama Bhutan telah menyepakati dan memperingatkan Tiongkok tentang bahwa proyek pembangunan jalan raya mereka. India telah menggarisbawahi bahwa kedua pemerintah pada tahun 2012 lalu telah mencapai kesepakatan bahwa titik-titik batas akan diselesaikan melalui konsultasi dengan negara terkait. Oleh karena itu, upaya sepihak dari Tiongkok yang telah menentukan titik-titik perbatasan tersebut dinilai melanggar kesepakatan ini.

Pada pernyataan yang dirilis oleh situs Kementerian Luar Negeri India pada tanggal 30 Juni 2017 tersebut, India juga menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Bhutan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa pembangunan jalan raya oleh Tiongkok di wilayah tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap perjanjian 1988 dan 1998 antara Bhutan dan Tiongkok. Bhutan juga menambahkan bahwa peristiwa tersebut akan mempengaruhi proses demarkasi batas antara kedua negara. Mereka mendesak Tiongkok untuk mengembalikan *status quo* wilayah Doklam seperti sebelum 16 Juni 2017.

Pernyataan India pada situs resmi mereka tersebut membuat Tiongkok geram. Pada tanggal 30 Juni 2017, Tiongkok menjawab pertanyaan dari India dan Bhutan atas protes mereka. Juru bicara Tiongkok *Lu Kang* membuat pernyataan tentang sejarah Doklam yang mana berarti proyek pembangunan jalan raya Tiongkok tersebut sepenuhnya berada di bawah wilayah yuridiksi Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang ditempati proyek tersebut merupakan garis lalu lintas tradisional antara Tiongkok dan Bhutan (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017). *Lu Kang* menyatakan bahwa sebelum tahun 1960-an, setiap penduduk perbatasan Bhutan di wilayah tersebut yang ingin menggembala disana, mereka harus membutuhkan persetujuan dari pihak Tiongkok serta diwajibkan untuk membayar pajak rumput ke Tiongkok. Menurut mereka, saat ini arsip dari *Xi Zang* di Tibet masih menyimpan bukti tersebut. Bukti yang dimaksud adalah penyimpanan beberapa tanda terima pajak rumput dari penduduk perbatasan Bhutan.

Asumsi tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, *Geng Shuang* yang menyatakan bahwa Perdana Menteri India, *Jawaharlal Nehru* telah menerima “Konvensi Anglo-China”. Pada tanggal 26 September tahun 1890, Perdana Menteri *Nehru* dengan tegas menyatakan bahwa batas antara Sikkim dan *Xi Zang* (Tibet) didefinisikan oleh “Konvensi Anglo-Cina” pada tahun 1890 (Ministry of Foreign Affair of the People's Republic of China, 2017). Pernyataan tersebut dibuat ketika Perdana Menteri India *Jawaharlal Nehru* membalas surat kepada Perdana Menteri *Zhou Enlai* pada tahun 1890. Pada saat itu, kedua belah pihak baik Perdana Menteri *Jawaharlal Nehru* maupun Perdana Menteri *Zhou Enlai* menerima konvensi itu dengan baik dan tidak ada perselisihan diantara keduanya mengenai batas antara Sikkim dan *Xi Zang* (Tibet) (Ministry of Foreign Affair of the People's Republic of China, 2017).

Pada tanggal 5 Juli 2017, Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa konsensus dengan Bhutan yang menyatakan bahwa Doklam adalah masuk kedalam wilayah teritori Tiongkok sudah terjadi sejak lebih dari 24 bulan lalu. Tiongkok mengklaim bahwa mereka memiliki konsensus dasar dengan Bhutan mengenai perbatasan Doklam tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa tidak ada perselisihan antara Tiongkok dan Bhutan di wilayah Doklam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, *Geng Shuang* menyatakan bahwa Tiongkok telah menekankan bahwa Doklam adalah milik mereka sejak zaman kuno. Tiongkok dan Bhutan melaksanakan sekitar 24 putaran pembicaraan perbatasan. Meskipun batas antara kedua negara belum diselesaikan, tetapi Tiongkok memiliki konsensus dasar tentang batas tersebut dan tidak ada perselisihan antara kami berdua ketika menyatakan bahwa Doklam adalah milik Tiongkok (Economic Times, 2018).

Sementara itu, pada tanggal 19 Juli 2017, Tiongkok kembali menyerukan agar India segera menarik tentaranya dari wilayah sengketa. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, *Lu Kang* mengatakan bahwa pasukan India harus meninggalkan daerah tersebut untuk menghindari peningkatan situasi (Arab News, 2017). *Lu Kang* juga menyatakan bahwa kami berharap pihak India akan

mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi dan segera mengambil langkah langkah untuk menarik pasukan yang secara ilegal melintasi perbatasan untuk kembali ke perbatasan India. Pernyataan *Lu Kang* tersebut muncul setelah penyiar *CCTV* negara bagian Tiongkok melaporkan bahwa brigade tentara yang dilengkapi dengan peluncur roket, senapan mesin berat, dan mortir baru-baru ini telah melakukan serangan penembakan langsung yang disimulasikan pada posisi musuh di Tibet. Latihan tersebut juga melibatkan pelacakan dan penargetan pesawat musuh. Meskipun Tiongkok dan Bhutan telah melakukan negosiasi perbatasan selama beberapa dekade tanpa insiden serius, Bhutan kali ini meminta bantuan dari India untuk mengirim pasukan yang melintasi perbatasan dari negara bagian Sikkim. Sementara itu, Tiongkok membahas dengan menutup celah guung terdekat yang biasa digunakan oleh peziarah India untuk mencapai *Gunung Kailash* yang notabene merupakan situs suci Hindu-Budha di Tibet.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2017 Menteri Luar Negeri China, *Wang Yi* melaporkan pada wartawan bahwa kejelasan antara siapa yang benar dan siapa yang salah pada konflik Doklam sudah sangat jelas (Ecns, 2017). Hal tersebut juga diakui oleh pejabat senior India yang secara terbuka mengatakan bahwa pasukan Tiongkok belum menyusup ke wilayah India. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa India mengakui telah memasuki wilayah Tiongkok. Menurut *Wang Yi*, solusi atas masalah ini sangat sederhana, yakni India menarik diri dari wilayah Doklam tersebut. Pejabat Senior tersebut adalah *Jon Taylor*, seorang profesor ilmu politik di Universitas St Thomas di Houston. Beliau mengatakan bahwa militer India telah melanggar baik hukum internasional maupun “Konvensi Anglo-Cina” dengan memasuki wilayah Tiongkok tak lama setelah Perdana Menteri *Modi* mengunjungi Amerika Serikat. Beliau juga menambahkan bahwa serangan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari kompetisi strategis yang lebih besar antara Tiongkok dan India yang dipengaruhi oleh dorongan *Trump* untuk kemitraan yang lebih dekat dengan India. India sebaiknya mengingat tanggapan dan penyelesaian dari Tiongkok selama perang perbatasan 1962. Provokasi yang terus-menerus dapat menyebabkan konflik yang

lebih luas dan lebih buruk lagi, dimana yang akan berujung pada kemenangan Tiongkok lagi.

Pada tanggal 2 Agustus 2017, Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis pernyataan yang berjudul “*The Facts and China’s Position Concerning the Indian Bordder Troops’ Crossing of the China-India Boundary in the Sikkim Sector into the Chinese Territory*” (Ministry of Foreign Affair of the People's Republic of China, 2017). China menganggap India menggunakan Bhutan sebagai teks untuk intervensi pertemuan masalah perbatasan antara Tiongkok dan Bhutan. Laporan tersebut mengacu pada India yang masuk tanpa ijin di Doklam. Tiongkok juga menyatakan pada 15 halaman dokumen tersebut untuk memperingatkan India tentang rencananya membangun jalan raya di Doklam yang menurutnya masih dalam wilayah teritorialnya. Menurut Tiongkok, Wilayah *Dong Lang* (Doklam) terletak di wilayah *Yadong* yang masuk kedalam Daerah Otonomi Tibet di Cina. Wilayah ini berbatasan dengan negara bagian Sikkim di India Barat dan Kerajaan Bhutan di selatan. Pada tahun 1890, Tiongkok dan Inggris menandatangani “Konvensi Anglo-Cina” yang berkaitan dengan batas antara wilayah Tibet dan Sikkim. Menurut Konvensi tersebut, wilayah *Dong Lang*, yang terletak di sisi perbatasan Tiongkok, tidak dapat disangkal merupakan wilayah teritorial Tiongkok. Menurut arsip sejarah mereka, pasukan perbatasan Tiongkok telah berpatroli di daerah tersebut. Selain itu, masyarakat perbatasan Tiongkok juga telah terbiasa untuk menggembala ternak mereka disana untuk waktu yang lama.

Pada pasal ke-empat dari *press release* tersebut menyebutkan bahwa batas Tiongkok-India di Sektor Sikkim sudah ada dan dibatasi oleh “Konvensi Anglo-Cina” tahun 1890 antara Britania Raya dan Tiongkok. Pada Pasal I Konvensi ini menetapkan bahwa Batas Sikkim dan Tibet akan menjadi puncak gunung yang memisahkan air yang mengalir ke *Teesta* Sikkim dan dari air yang mengalir ke *Mochu* Tibet yang selanjutnya mengalir ke Sungai Tibet utara lainnya. Jalur dimulai di “Gunung Gipmochi” pada perbatasan Bhutan, dan mengikuti perpisahan air yang disebutkan ke atas hingga ke titik di mana ia bertemu wilayah Nepal. "(Gunung Gipmochi saat ini dikenal sebagai Gunung Ji Mu Ma Zhen).

Konvensi memberikan yang jelas dan deskripsi tepat tentang penyelarasan batas di sektor ini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017).

Sementara itu, pada pasal ke-enam, Tiongkok juga menyatakan bahwa sejak 18 Juni, pasukan perbatasan India telah secara ilegal melintasi perbatasan Tiongkok-India di Sektor Sikkim dan masuk ke wilayah Tiongkok. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Peristiwa itu terjadi di suatu daerah di mana ada batas yang jelas dan dibatasi. Pasukan perbatasan India yang telah menyeberangi batas negara yang sudah dibatasi merupakan sebuah insiden yang sangat serius, karena telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok serta bertentangan dengan “Konvensi Anglo Cina” tahun 1890 dan Piagam PBB, dan menginjak-injak prinsip-prinsip dasar dari hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional.

Menurut Tiongkok, proyek pembangunan jalan raya tersebut masih dalam wilayah teritorial mereka. Perihal tersebut tertera pada *press release* dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 2 Agustus 2017, khususnya pada pasal ke-enam. Pada pasal itu, Tiongkok menyebutkan bahwa mengacu pada “Konvensi Anglo-Cina” tahun 1890, batas antara Tiongkok dan India di Sektor Sikkim sudah ada dan telah dibatasi, yang mana wilayah *Dong Lang* (Doklam) adalah wilayah Tiongkok. Proyek pembangunan jalan raya oleh Tiongkok tersebut bertujuan untuk meningkatkan transportasi lokal, yang sepenuhnya sah dan sah. Tiongkok tidak menyeberang batas dalam pembangunan jalannya. Pasukan perbatasan India secara terang-terangan telah melintasi batas yang diakui bersama untuk menyusup ke wilayah Tiongkok serta melanggar kedaulatan wilayah Tiongkok. Tiongkok memang secara fakta ingin mencoba untuk mengubah *status quo* dari batas, dan itu sangat buruk serta merusak kedamaian dan ketenangan wilayah perbatasan.

Pada pasal berikutnya yakni pasal ke-tigabelas, Tiongkok juga mempertanyakan keterlibatan India pada kasus Doklam. Pasal tersebut menyatakan bahwa wilayah *Dong Lang* (Doklam) selama ini menjadi bagian dari Tiongkok dan di bawah Yurisdiksi Tiongkok. Tiongkok menganggap tidak ada perselisihan dalam hal ini. Sejak 1980-an, Tiongkok dan Bhutan, sebagai dua negara berdaulat dan independen telah terlibat dalam negosiasi dan konsultasi



untuk menyelesaikan permasalahan mengenai batas mereka. Kedua belah pihak, sejauh ini, telah melakukan 24 putaran pembicaraan dan mencapai konsensus luas. Masalah perbatasan Tiongkok-Bhutan adalah murni permasalahan antara Tiongkok dan Bhutan. Perihal tersebut tidak ada hubungannya dengan India. Sebagai pihak ketiga, India tidak memiliki hak untuk ikut campur atau menghalangi pembicaraan perbatasan antara Tiongkok dan Bhutan. Intrusi India ke dalam wilayah Tiongkok di bawah dalih Bhutan tidak hanya melanggar kedaulatan wilayah Tiongkok, tetapi juga menantang kedaulatan dan kemerdekaan Bhutan. Tiongkok dan Bhutan adalah tetangga yang bersahabat. Tiongkok selama ini menghormati Bhutan sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Berkat upaya bersama kedua belah pihak, daerah perbatasan antara Tiongkok dan Bhutan selalu menikmati perdamaian dan ketenangan. Tiongkok akan terus bekerja-sama dengan Bhutan untuk menyelesaikannya masalah perbatasan antara kedua negara melalui negosiasi dan konsultasi tanpa adanya gangguan eksternal lainnya.

Sehari setelah lima-belas pasal dinyatakan dan dirilis secara resmi pada situs Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Juru Bicara Menteri Luar Negeri, *Geng Shuang* juga merilis pernyataan bahwa India tidak berniat untuk melakukan perdamaian (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017). Lebih lanjut, *Geng* juga menyatakan bahwa India telah menempatkan pasukan militer serta memperbaiki jalan di sepanjang sisi perbatasannya di tengah pertikaian yang semakin tegang di wilayah perbatasan di samping Bhutan. Pada sebuah pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan bahwa tidak ada negara yang boleh meremehkan militer Tiongkok serta mempertanyakan kemampuannya untuk memenuhi misinya dalam menjaga perdamaian, serta tidak boleh ada yang meremehkan tekad dan kemauan militer Tiongkok dalam membela kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan negaranya.

Selanjutnya, ketegangan antara Tiongkok dan India pada konflik di Doklam semakin memanas. Pihak India memaksa Tiongkok untuk memindahkan peralatan konstruksi dari lokasi tersebut. Berkaitan dengan tindakan Tiongkok yang dirasa terlalu agresif di wilayah perbatasan Doklam tersebut, India perlahan

mulai mengerahkan militernya ke wilayah konflik. Angkatan Darat India terus bergerak pelan-pelan menuju ke “daerah siaga operasional” mereka yang terletak di *Sikkim* dan *Arunachal Pradesh*. Sementara itu di wilayah timur, India menempatkan 33 Korps (17 Korps di *Gangtok* dan 27 Korps di *Kalimpong*) yang berpusat di *Sukna*. Masing-masing divisi Korps memiliki 10.000-15.000 tentara yang telah melakukan penyesuaian dengan medan untuk daerah dengan ketinggian tinggi ke depan. Tidak hanya itu, India juga telah menyiapkan 3 Korps di *Dimapur* dan 4 Korps di *Tezpur* dengan divisi infanteri dan *Mountain division*. Selanjutnya, India juga mengaktifkan pangkalan Angkatan Udara India di Timur Laut untuk mempertahankan siaga operasional tinggi, dengan patroli udara tempur secara reguler. Pengerahan militer tersebut merupakan respon India terhadap adanya *Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok* (PLA's Army) yang diindikasikan mencapai 1.500 tentara di sekitar wilayah Doklam (Harian Jejak Tapak, 2017).

Disisi lain, Tiongkok tetap bersikukuh untuk meneruskan proyek pembangunannya, karena pembangunan infrastruktur tersebut dianggap masih dalam teritorial mereka. Tiongkok tidak gentar dengan perilaku India yang terkesan agresif dalam menyikapi konflik tersebut. Tentara Pembebasan Rakyat atau *The People's Liberation Army* (PLA) diberitakan tengah membangun pusat komando pasukan militer di sekitar daerah terjadinya konflik di Doklam. PLA dilaporkan juga bahwa mereka sedang membangun infastruktur militer yang berjarak sekitar tiga mil dari daerah konflik di Doklam. Infrastruktur militer yang dimaksud meliputi tempat peletakan mortir dan senapan mesin serta sembilan bangunan tiga lantai yang digunakan sebagai barak, ditambah juga sekitar 300 kendaraan militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, *Hua Chunying* mengatakan bahwa pasukan tentara Tiongkok akan terus melakukan patroli di wilayah Doklam serta terus menegaskan hak-hak kedaulatannya untuk melindungi teritori kedaulatan Tiongkok, sesuai dengan peraturan perbatasan berdasarkan sejarah (Sputnik News, 2017).

Berbulan-bulan setelah pernyataan Menteri Luar Negeri India tersebut, ketegangan antara Tiongkok dan Bhutan memang berkurang. Akan tetapi, fakta

berkata lain. Tiongkok beristirahat untuk memfokuskan diri pada Konferensi BRICS ke-sembilan yang diselenggarakan di *Xiamen* tanggal 3-5 September 2017 (Asia Times News, 2018). Setelah konferensi tersebut berakhir, ketegangan kedua negara tersebut mulai memanas lagi. Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, *Hua Chunying* mengatakan bahwa Tiongkok telah lama membangun jalan dan infrastruktur lainnya disana sebagai perlindungan perbatasan, dan untuk membantu kehidupan penduduk lokal. Ia juga menambahkan bahwa pasukan perbatasan Tiongkok akan terus berpatroli di wilayah tersebut. Seraya berjanji bahwa Tiongkok akan “melindungi kedaulatan teritorinya” (The Straits Times, 2017). Sehingga, konflik antara Tiongkok dan India di Doklam justru jauh dari kata berakhir hingga saat ini.

### BAB III

## ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN INDIA DALAM KONFLIK DI DOKLAM

### 3.1 Gambaran Umum Doklam

Doklam disebut juga *Zhoglam* dalam bahasa Tibet, yang kemudian diadopsi oleh Tiongkok dan lebih dikenal sebagai *Donglang* dalam bahasa Tiongkok. Wilayah Doklam merupakan sebuah wilayah dengan dataran yang tinggi. Wilayah tersebut terletak diantara *Lembah Chumbi Tibet* di utara, *Lembah Ha Bhutan* di timur, serta *Sikkim India* di barat (The Diplomat, 2017). Wilayah Doklam tersebut telah dimasukkan kedalam wilayah Bhutan pada peta Bhutan semenjak tahun 1961. Akan tetapi, wilayah tersebut juga di klaim oleh Tiongkok sebagai wilayahnya. Sebagai wilayah perbatasan antara Tiongkok dan Bhutan, status Doklam masih belum jelas kepemilikannya.



Gambar 3.1

Letak geografis wilayah Doklam

(Sumber: [www.indiandefencereview.com](http://www.indiandefencereview.com))

Wilayah yang diberi warna merah pada peta diatas merupakan daerah yang masih dipersengketakan antara Tiongkok dan Bhutan yang pada akhirnya dinamai secara umum sebagai wilayah Doklam atau *Dong Lang*. Tiongkok dan Bhutan yang saling klaim atas wilayah tersebut hingga saat ini masih belum memiliki hubungan diplomatik resmi. Akan tetapi, mereka telah melakukan 24 pembicaraan diplomatik atas segala permasalahan yang mencakup perbatasan kedua negara tersebut. Pembicaraan tersebut pada akhirnya mengarah ke sebuah penetapan garis batas sementara wilayah Doklam yang terletak lebih jauh ke utara dari klaim Tiongkok. Penetapan sementara tersebut berdasarkan pada jalur perdagangan tradisional antara Kerajaan Bhutan dan Kerajaan Tibet pada masa lalu. Sehingga, wilayah Doklam didefinisikan terletak diantara *Lembah Chumbi* dan seluruh negara Bhutan (The Diplomat, 2017).

Wilayah Doklam yang menjulang membatasi Tiongkok dan Bhutan memang vital secara geografis. Bentuk wilayah Doklam ini adalah dataran tinggi, yang mana dapat digunakan untuk saling memantau pergerakan negara lain. Seperti yang telah dijabarkan di bab pertama, perselisihan batas wilayah antara Tiongkok dan Bhutan di wilayah Doklam ini masih belum menemukan titik temu. Keduanya saling bersikukuh menetapkan bahwa wilayah Doklam ini merupakan wilayah teritorial kedaulatan negara mereka. Beberapa kali sempat terjadi pertemuan dan bahkan diagendakan secara rutin tiap tahun antara Tiongkok dan Bhutan. Akan tetapi, keduanya masih juga belum menemukan solusi yang tepat atas pembagian dan penetapan garis perbatasan di Doklam.

Fenomena saling Klaim wilayah teritorial antara Tiongkok dan India (negara sekutu Bhutan yang mendukung Bhutan atas konflik dengan Tiongkok di Doklam) telah menjadi sebuah kajian menarik yang masih belum memiliki ujung hingga saat ini. Sebenarnya, klaim India dan Tiongkok tersebut sama-sama berasal dari “Konvensi Kalkuta” atau disebut juga “Konvensi Anglo-Cina” yang terjadi antara Inggris dan Kerajaan Tiongkok pada tahun 1890”. Konvensi tersebut berbunyi:

“Pasal 1, batas Sikkim dan Tibet didefinisikan sebagai puncak pegunungan yang memisahkan air yang mengalir ke Sungai Teesta di Sikkim dan anak-anak sungainya dari perairan yang mengalir ke Sungai Mochu Tibet dan ke utara ke sungai-sungai lain di Tibet. Garis dimulai di Gunung Gipmochi di perbatasan Bhutan, dan mengikuti daerah aliran sungai di atas ke titik di mana ia bertemu wilayah Nepal.” (Convention between Great Britain and China relating to Sikkim and Tibet, 1890)

Akan tetapi, konvensi tersebut tetap saja menuai kontroversi. Fenomena tersebut diakibatkan karena ketidak-jelasan wilayah yang dimaksud. Oleh karena itu, India menginterpretasikan menurut pemahamannya, serta Tiongkok juga mendefinisikan konvensi tersebut sesuai dengan kemauannya. Melihat fenomena tersebut, maka titik temu diantara keduanya tentang perbatasan tersebut masih cukup panjang.



Gambar 3.2

Klaim Perbatasan Tibet-Sikkim oleh Tiongkok

(Sumber: Takhasila Intitution)

Gambar peta diatas dirilis oleh Tiongkok berdasarkan pada penafsiranya terhadap “Konvensi Anglo-Cina tahun 1890”. Pada peta tersebut terlihat bahwa Tiongkok menempatkan perbatasan antara Tiongkok, India, dan Bhutan lebih ke selatan, dimana batas tersebut ditandai dengan “Gunung Gipmochi”. Garis titik-titik kecil pada peta diatas merupakan garis perbatasan yang ditafsirkan oleh India, dimana pada akhirnya garis tersebut dipakai dalam pembentukan peta internasional sekarang. Perbedaan diatas didasari pada penafsiran dan pemahaman yang berbeda antara Tiongkok dan India terhadap isi dari “Konvensi Anglo-Cina” tahun 1890.

Tiongkok beranggapan bahwa konvensi tersebut (yang merupakan konvensi antara Kerajaan Tiongkok dengan pihak Inggris di India) juga berlaku kepada India yang mana India dianggap sebagai negara penerus kolonialisme Inggris di wilayah tersebut. Titik batas yang telah disepakati sejak lama tersebut bahkan tetap berlaku dengan ada maupun tidak ada negara Bhutan. Sementara itu, Tiongkok masih berpedoman pada konvensi tersebut tentang garis perbatasan dengan India dan Bhutan, yang mana kalimat kedua pada pasal I konvensi tersebut menyatakan bahwa garis perbatasan tersebut dimulai dari “Gunung Gipmochi” dan berjalan seiring aliran sungai hingga ke titik dimana ia bertemu dengan wilayah Nepal, seperti yang tertera pada peta dibawah ini

Sementara itu, pihak India menafsirkan konvensi tersebut dengan lebih rumit dari Tiongkok. Jika Tiongkok mendefinisikan pembatasan wilayah tersebut sama dengan pembatasan-pembatasan wilayah Himalaya lainnya yang mana beracuan pada “aliran sungai” sebagai pembatasnya, maka India mendefinisikan perbatasan tersebut pada garis “punggungan gunung” yang berdasarkan pada puncak pegunungan-pegunungan tertinggi. Interpretasi India beracuan pada kalimat pertama dalam konvensi tersebut yang menyatakan bahwa batas Sikkim dan Tibet didefinisikan sebagai puncak pegunungan yang memisahkan air yang mengalir ke *Sungai Teesta* di Sikkim dan anak-anak sungainya dari perairan yang mengalir ke *Sungai Mochu* Tibet dan ke utara ke sungai-sungai lain di Tibet. Oleh karena itu, mereka mendefinisikan perbatasan keduanya terletak pada “garis

punggungan pegunungan” yang dimulai dari “puncak tertinggi” di wilayah tersebut.

Pada wilayah Doklam tersebut memang ada sebuah “garis punggung gunung” berkelanjutan yang membentang dari titik batas India, Nepal, dan Tiongkok saat ini ke daerah dimana kebuntuan saat ini (Doklam) terjadi. Akan tetapi menurut India, garis punggung pegunungan tersebut berakhir di *Batang La*. Oleh karena itu, India dan Bhutan mengklaim bahwa garis perbatasan tersebut berada di wilayah *Batang La*. India sedikit mengabaikan pernyataan bahwa konvensi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa garis perbatasan berada di “Gunung Gipmochi”. Jika kita telisik lebih lanjut, maka kalimat pertama pada konvensi tersebut tidak selaras dengan kalimat kedua. Selain itu, pernyataan dari sejarawan *Claude Arpi* akan menambah kebingungan pada kasus ini. Pada sebuah penelitiannya di Himalaya, beliau menyatakan bahwa orang-orang Sikkim menyebut *Batang La* adalah *Gipmochi*. Maka dari itu, perseteruan perbatasan ini masih jauh dari kata selesai.

### **3.2 Ancaman Terhadap Pertahanan India**

Perilaku India yang masuk kedalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di wilayah Doklam merupakan sebuah fenomena menarik. Terlepas dari perjanjian India dengan Bhutan, kehadiran India pada konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan tersebut tentu menimbulkan banyak tanya. Berbagai pertanyaan tersebut muncul ketika melihat fakta bahwa India tidak memiliki kaitan maupun berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Keterlibatan India tentu memiliki faktor lain yang lengkap beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut tentu nantinya akan mengerucut pada strategi kepentingan nasional serta strategi luar negeri dari India.

Wilayah Doklam yang secara tidak langsung menjadi sebuah perbatasan antara Tiongkok dan Bhutan pada kenyataannya dampak yang ditimbulkan tidak hanya jatuh pada kedua negara tersebut, akan tetapi juga mencakup tetangga sekaligus sekutu dari Bhutan yakni India. India memang tidak secara langsung berbatasan atau bersinggungan dengan wilayah Doklam. Akan tetapi, keberadaan



pasukan Tiongkok disana merupakan ancaman serius bagi pertahanan dan keamanan India. Pembangunan jalan raya oleh Tiongkok tersebut diprediksi memungkinkan perjalanan sejauh 500 kilometer dari *Yadong* menuju ke *Doka La* hanya dengan waktu tempuh hanya kurang dari delapan jam. Akses tersebut berpotensi besar untuk mendatangkan mobilitas yang intens dari masyarakat maupun militer dari Tiongkok. Terlebih, *Doka La* merupakan titik perbatasan tiga negara atau disebut juga “*trijunction point*” antara Tiongkok, India, dan Bhutan yang sangat dekat dengan “*chicken’s neck*” India.

Fenomena yang paling mengancam pertahanan dari India adalah pernyataan dari Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, *Hua Chunying*. Beliau mengatakan bahwa pasukan tentara Tiongkok akan terus melakukan patroli di wilayah Doklam serta terus menegakkan hak-hak kedaulatannya untuk melindungi teritori kedaulatan Tiongkok, sesuai dengan peraturan perbatasan berdasarkan sejarah (Reuters, 2017). Pernyataan tersebut bermuatan ancaman bagi kedaulatan teritorial India dikarenakan pada batas wilayah antara India-Tiongkok memang belum sepenuhnya terselesaikan. Kedua negara tersebut faktanya masih mempersengketakan beberapa wilayah di perbatasannya. Perbedaan mengenai batas antara India dan Tiongkok membuat klaim sejarah yang akan digunakan oleh Tiongkok mengenai beberapa wilayah perbatasan India. Artinya, India harus melepas wilayah tersebut kepada Tiongkok.

India yang merupakan bekas jajahan Inggris memang sedikit bermasalah terhadap batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah India yang masih kabur seperti *Kashmir*, *Arunachal Pradesh*, serta *Doka La*. Kolonial Inggris yang pada saat itu sering disebut dengan *British East Company* memang tidak menggambarkan garis batas yang nyata untuk setiap wilayah jajahannya. Kemerdekaan India pada tahun 1947 menjadi momentum menyenangkan sekaligus tugas besar bagi India. Salah satu tugas yang harus diselesaikan adalah menentukan batas-batas negara yang masih belum pernah dibatasi secara nyata oleh *British East Company*. Pada kasus ini, India dan Tiongkok masih memiliki batas-batas wilayah yang belum terselesaikan, khususnya mengenai “*trijunction point*” di wilayah *Doka La*, yang

membuat kedua negara tersebut terlibat perang dingin atas klaim wilayah perbatasan mereka.

Klaim wilayah perbatasan India-Tiongkok menempatkan klaim atas Tibet dan Sikkim pada masa silam yang beracuan pada “Konvensi Anglo-Cina” tahun 1890. Pada konvensi tersebut, batas antara Tibet dan Sikkim tidak digariskan dengan jelas, akan tetapi dideskripsikan berdasarkan gambaran geografis, sehingga menciptakan penafsiran yang berbeda. Tiongkok menafsirkan konvensi tersebut dengan menempatkan batas dari wilayahnya pada sungai yang mengalir menuju Nepal yang dimulai dari “Gunung Gipmochi” yang terletak tepat di perbatasan India-Bhutan bagian barat. Sementara itu, India menafsirkan bahwa perbatasan Sikkim-Tibet terletak pada punggung gunung yang memisahkan *Sungai Teesta* dan *Sungai Mochu*. India menggabmbarkan bahwa perbatasan Sikkim dan Tibet terletak lebih ke utara (seperti yang ada di peta sekarang), yakni terletak diantara *Lembah Chumbi* dan seluruh negara Bhutan. Perbedaan penafsiran tersebut membuat India dan Tiongkok masih memperdebatkan persoalan perbatasan ini.

Pernyataan dari Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok tersebut menyiratkan bahwa Tiongkok akan berjuang mendapatkan wilayahnya berdasarkan sejarah, termasuk perbatasannya dengan India. Sementara itu, “Gunung Gipmochi” yang diperjuangkan oleh Tiongkok tergambar dalam peta interasional masuk ke dalam wilayah perbatasan di India. Pernyataan tersebut pada akhirnya merupakan sebuah serangan terhadap kedaulatan teritorial India. Tiongkok berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan India khususnya pada wilayah perbatasan, sehingga India merasa perlu untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah kedaulatan teritorialnya dari serangan Tiongkok.

Ancaman yang muncul dari Tiongkok di Doklam tidak hanya berhenti di situ. Doklam yang merupakan wilayah dataran tinggi menjadi penting bagi keamanan India dikarenakan letaknya yang sangat dekat dengan apa yang sering disebut dengan “*chicken’s neck*” wilayah India. Istilah “*chicken’s neck*” ini merujuk pada sebuah jalur sempit di wilayah “*Koridor Siliguri*” di India yang mana merupakan peninggalan kartografi dari proses dekolonialisasi Inggris di

India. Kerajaan Inggris di India menarik dan mempartisi wilayah Kerajaan Inggris di India di sepanjang garis kepercayaan untuk menciptakan sebuah negara modern di India. Mereka kemudian menarik sebuah garis yang mengarah ke “*Koridor Siliguri*” dalam upaya mempertahankan persentuhan antara wilayah *Bengal* dan *Assam*. Penciptaan Pakistan Timur (yang kemudian berubah menjadi Bangladesh pada tahun 1971) serta wilayah *Assam* dan *Manipur* di sepanjang garis kepercayaan tersebut mengharuskan untuk melewati titik canggung pada geografi India. Jarak terdekat pada wilayah tersebut berjarak kurang dari 14 mil yang terletak diantara perbatasan Bangladesh dan Nepal. Wilayah sempit tersebut selanjutnya diberi istilah “*chicken’s neck*” atau disebut juga “*Koridor Siliguri*” (The Diplomat, 2013). Melihat keadaan geografi wilayah tersebut, maka India beranggapan bahwa wilayah Doklam ini adalah sebuah belati yang menunjuk pada apa yang disebut dengan sektor “*chicken’s neck*” India.

Wilayah “*chicken’s neck*” menjadi sangat penting bagi India dikarenakan wilayah tersebut adalah jalur sempit dan satu-satunya yang menghubungkan wilayah India pusat dengan wilayah pinggiran India seperti daerah *Assam*, *Manipur*, *Bengal* dan sekitarnya. India mau tidak mau harus menempatkan jalur utama untuk menghubungkan wilayah pusat India dengan wilayah pinggiran India melewati sepanjang wilayah “*chicken’s neck*” tersebut. Salah satu faktor yang mengharuskan dikarenakan kurangnya perjanjian perdagangan bebas antara India dan Bangladesh. Sehingga, akses ke daerah *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya tidak bisa melalui Bangladesh, akan tetapi harus berputar sedikit ke utara dan menyusuri “*Koridor Siliguri*”. Akses utama di wilayah “*chicken’s neck*” adalah dengan menggunakan jalur kereta api tunggal. Akses tersebut menjadi satu-satunya pilihan ketika India ingin mendistribusikan barang yang berkapasitas banyak. Selain jalur tunggal kereta api, India sebenarnya memiliki jalan raya yang melintasi wilayah “*chicken’s neck*” tersebut. Akan tetapi, Topografi yang ekstrim di wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk distribusi yang banyak dan penting. Sehingga, pilihan menggunakan jalur kereta api tunggal menjadi satu-satunya jalan terbaik untuk distribusi ke wilayah *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya.

India baru memulai perihal perdagangan bebas dengan Bangladesh dan Nepal pada tahun 2002. Perundingan tersebut tentu bertujuan agar distribusi dari India pusat ke wilayah pinggiran seperti *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya tidak lagi harus melewati “*Koridor Siliguri*” yang rawan tersebut. Ketiga negara yakni India, Bangladesh dan Nepal mulai membahas sebuah proposal untuk menciptakan perjanjian perdagangan bebas yang akan menjamin pergerakan barang mereka. Akan tetapi, pertemuan tersebut hingga saat ini masih belum melahirkan sebuah perjanjian perdagangan diantara mereka. Hingga akhirnya, wilayah “*chicken’s neck*” tetap menjadi pilihan utama dan satu-satunya meskipun termasuk kedalam kategori rawan.

Fakta bahwa jalur kereta api tunggal adalah pembawa barang utama di wilayah tersebut telah rusak akibat tanah longsor dan bencana alam yang terjadi semakin menguatkan bahwa wilayah tersebut memiliki topografi yang keras (The Diplomat, 2013). Fakta tersebut menambah tingkat kerawanan wilayah “*chicken’s neck*” serta menandakan bahwa India harus memprioritaskan jalur tersebut untuk mencapai distribusi yang merata bagi negaranya. Sehingga, jika Doklam jatuh ke tangan Tiongkok maka setiap pergerakan dari India akan dengan mudah terpantau oleh Tiongkok. Argumen tersebut ditunjang dengan letak wilayah Doklam yang tinggi serta berdekatan dengan wilayah “*chicken’s neck*” India. Maka dari itu, potensi ancaman atas pertahanan dan keamanan India akan muncul ketika pembangunan jalan raya oleh Tiongkok selesai.

### **3.3 Ancaman Terhadap Perekonomian India**

Perilaku agresif Tiongkok di perbatasan Tiongkok-Bhutan juga akan berdampak pada kepentingan perekonomian India. Penguasaan dan kemudahan akses darat oleh Tiongkok melalui proyek jalan raya yang menghubungkan wilayah *Chengdu*, *Yadong* dengan *Doka La* tersebut merupakan ancaman serius bagi perekonomian India. Beberapa kajian mengenai aksesibilitas menekankan bahwa aksesibilitas merupakan satu poin penting yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat maupun wilayah terkait. Aksesibilitas ini terkait dengan jarak lokasi suatu daerah terhadap daerah lainnya, khususnya jarak lokasi ke pusat-pusat

pelayanan publik (*public service*) yang secara spasial identik dengan ibukota propinsi, ibukota kabupaten/kota, maupun daerah metropolitan. Selanjutnya, aksesibilitas dianggap penting dalam sektor ekonomi karena terkait dengan waktu tempuh dan biaya. Sehingga semakin mudah dan dekat akses suatu wilayah terhadap daerah ibukota propinsi, ibukota kabupaten/kota, maupun kota metropolitan, maka wilayah tersebut akan memiliki keuntungan dalam hal produksi.

Pada suatu pedesaan atau wilayah, aksesibilitas memiliki keterkaitan terhadap kebutuhan dasar yang secara tidak langsung berhubungan dengan aspek kesejahteraan sosial maupun aspek ekonomi. Aksesibilitas dalam suatu pedesaan atau wilayah dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat wilayah tersebut untuk menjangkau sumber-sumber daya produktif yang meliputi modal, informasi, serta sarana produksi dan pasar (Setiawan, 2006). Tingkat aksesibilitas wilayah juga bisa diukur berdasarkan pada beberapa variabel, yakni ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang dan lebar jalan, dan kualitas jalan (Miro, 1997). Penentuan aksesibilitas tidak hanya terkait dengan variabel aksesibilitas diatas, akan tetapi faktor topografi wilayah juga menjadi satu aspek tambahan yang juga dapat mempengaruhi fungsi rendahnya aksesibilitias. Hal tersebut dikarenakan topografi dapat menjadi penghalang bagi kelancaran untuk mengadakan interaksi di suatu daerah (Ellis, 1997). Pentingnya sistem dan sarana transportasi dalam suatu wilayah, menjadikan aksesibilitas sebagai salah satu penentu dalam pembangunan suatu wilayah baik dari aspek ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, semakin meningkatnya perkembangan transportasi dan aksesibilitas, suatu wilayah akan dapat memperbaiki perekonomiannya.

Pembangunan jalan raya oleh Tiongkok di wilayah tersebut tentu merupakan sebuah serangan bagi India terhadap Bhutan. *Thimpu* yang notabene merupakan ibukota dari Bhutan secara geografis letaknya justru lebih dekat dengan *Yadong* yang merupakan tempat dimana proyek pembangunan jalan raya tersebut terjadi. Kemungkinan besar, *Yadong* akan menjadi daerah yang menimbun pasokan dari wilayah *Chengdu* (Tiongkok) dan memungkinkan untuk

Bhutan serta wilayah *Assam* (India) untuk menjadi tempat mendapatkan bahan produksi serta menjual hasil produksi disana. Hal tersebut tentu berdasarkan pada kemudahan aksesibilitas yang pada akhirnya akan memangkas waktu maupun biaya pada proses produksi.

Bhutan sendiri merupakan pasar terbaik bagi India. Bhutan mengimpor beberapa barang dari India, seperti mineral, minyak, pembangkit nuklir, besi dan baja (Trading Economics, 2012). Sementara itu, Bhutan juga merupakan eksportir penting India di bidang sulfur, batu, plaster, dan semen (Trading Economics, 2012). India merupakan partner dagang terbesar bagi Bhutan. Hampir 79% dari total impor Bhutan berasal dari India. Sementara itu, India menyediakan pasar untuk 90% dari ekspor Bhutan. India merupakan penyumbang bantuan terbesar bagi Bhutan. Pada tahun 2000 hingga 2017, Bhutan telah menerima bantuan senilai 4,7 milyar dollar dari India. Bantuan tersebut dipusatkan pada pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga air di Bhutan yang kemudian aliran listriknya akan dijual kembali ke India. Ekspor listrik Bhutan ke India telah menjadikan Bhutan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di Asia. Keperluan energi listrik yang sangat besar mengharuskan India untuk memprioritaskan hubungan kerjasamanya dengan Bhutan.

Akan tetapi, kerjasama tentang pembangkit listrik tenaga air tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran di Bhutan. Pada tahun 2005 hingga 2017, jumlah pengangguran di Bhutan naik dari 5,4% menjadi 6%. Pembangkit listrik tenaga air hanya mampu menyediakan 2% dari tenaga kerja Bhutan. Kerjasama perekonomian India-Bhutan pada proyek pembangkit listrik tenaga air memang telah memperkuat Bhutan secara perekonomian. Akan tetapi, kerjasama tersebut tidak mampu untuk menekan angka pengangguran di Bhutan. Perihal tersebut mendorong Bhutan untuk mencari diverifikasi ekonomi.

Bhutan telah menyuarakan minat mereka terhadap strategi *One Belt, One Road* milik Tiongkok. Keinginan Bhutan tersebut muncul dari Perdana Menteri Bhutan, *Tshering Tobgay* dalam pidato parlemennya pada bulan Juni 2018. Beliau menyatakan bahwa hubungan Bhutan dengan Tiongkok yang merupakan ekonomi terbesar kedua dunia terus meningkat dan kami akan terus menjaga hubungan

yang damai dan ramah dengan Tiongkok.(Wischer, 2019) Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Bhutan secara tidak langsung akan mendukung strategi kebijakan *One Belt, One Road* milik Tiongkok dengan harapan Tiongkok mampu memenuhi masalah pengangguran di Bhutan,

Pada bulan Juli 2018, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, *Kong Xuanyou* membahas agenda *One Belt, One Road* dengan Raja Bhutan, *Jigme Singye Wangchuk* dan Perdana Menteri Bhutan, *Tshering Tobgay* di *Thimphu*. Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa Bhutan menyambut hasil positif dari kebijakan *One Belt, One Road* serta Bhutan berkomitmen untuk memperdalam pertukaran dan kerjasama dengan Tiongkok. Bhutan mungkin akan menemukan titik terang atas persengketaan wilayah perbatasan dengan Tiongkok setelah kebijakan dan proposal pembangunan Tiongkok disetujui oleh Bhutan.

Analisis dan akademis, *Richard Heydarian* memberikan analisisnya tentang Filipina yang akhirnya mengakui wilayah yang disengketakan kedua negara di Laut Cina Selatan. Beliau berargumen bahwa Tiongkok mungkin memberikan insentif (keuangan) untuk memikat Filipina menjadi konsesi geopolitiknya. Pada kasus di Doklam ini, potensi bantuan pembangunan yang ditawarkan Tiongkok diperkirakan akan mampu membujuk Bhutan untuk mempertimbangkan persengketaan di wilayah perbatasan Tiongkok-Bhutan dengan kepentingan perekonomian Bhutan.(Wischer, 2019)

Fenomena tersebut merupakan ancaman bagi perekonomian India. Selama ini, Bhutan merupakan mitra dagang terbesar bagi India. India telah membiayai penuh agenda pembangunan lima tahunan Bhutan yang dimulai pada tahun 1962. Dana tersebut paling banyak dialokasikan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air, yang mana surplus dari listrik di Bhutan akan di ekspor ke India. India memang memiliki masalah atas ketersediaan listrik di wilayahnya. Hampir 40% warga di India kekurangan akses listrik untuk menjalankan bisnis dan industrinya. Selain itu, Bhutan juga merupakan pasar dan tujuan investasi masyarakat India. Fenomena tersebut tergambar jelas pada angka impor Bhutan dari India yang mencapai 80,56% dari total impor Bhutan pada tahun 2017. Sementara itu, Ekspor Bhutan ke India mencapai angka 84,56% pada tahun yang sama (Wischer 2019).

Mendekatnya Bhutan ke Tiongkok akan menjadi ancaman bagi kepentingan ekonomi India. India yang menempatkan Bhutan pada pasar, tujuan investasi dan sumber energi listrik utama tentu tidak ingin Bhutan mengalihkan kerjasama ekonomi pada Tiongkok.

Kemudahan akses jalan raya yang sedang dibangun oleh Tiongkok tentu membuat masyarakat India di wilayah *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya akan memikirkan ulang ketika mengambil bahan, maupun sumber daya produksi dari India pusat. Terlebih, secara geografis wilayah tersebut lebih dekat dengan Tiongkok daripada India pusat. Kesenjangan perekonomian antara India pusat dengan wilayah *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya tentu saja membuat wilayah tersebut kembali mempertimbangkan tentang faktor-faktor yang bisa membuat mereka lebih baik pada aspek perekonomiannya. Biaya serta efisiensi waktu akan menjadi pertimbangan yang kuat atas proses produksi di wilayah tersebut yang selanjutnya akan berdampak pada perekonomian mereka. Fenomena tersebut tentu menjadi sebuah kekuatiran khusus bagi India. Apabila penciptaan jalan raya oleh Tiongkok menciptakan kemudahan aksesibilitas bagi wilayah *Assam* (India), maka masyarakat wilayah tersebut akan lebih memilih untuk mengambil, maupun menjual hasil produksi ke wilayah Tiongkok. Hal tersebut tentu merupakan sebuah kerugian besar bagi perekonomian India dan justru akan membantu perekonomian di Tiongkok.

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, wilayah “*chicken’s neck*” atau disebut juga “*Koridor Siliguri*” memiliki posisi penting bagi India. Istilah “*chicken’s neck*” ini merujuk pada sebuah jalur sempit di wilayah “*Koridor Siliguri*” di India yang mana merupakan peninggalan kartografi dari proses dekolonisasi Inggris di India. Kerajaan Inggris di India menarik dan mempartisi wilayah Kerajaan Inggris di India di sepanjang garis kepercayaan untuk menciptakan sebuah negara modern di India. Mereka kemudian menarik sebuah garis yang mengarah ke “*Koridor Siliguri*” dalam upaya mempertahankan persentuhan antara wilayah *Bengal* dan *Assam*. Penciptaan Pakistan Timur (yang kemudian berubah menjadi Bangladesh pada tahun 1971) serta wilayah *Assam* dan *Manipur* di sepanjang garis kepercayaan tersebut mengharuskan untuk



melewati titik canggung pada geografi India. Jarak terdekat pada wilayah tersebut berjarak kurang dari 14 mil yang terletak diantara perbatasan Bangladesh dan Nepal. Wilayah sempit tersebut selanjutnya diberi istilah "*chicken's neck*" atau disebut juga "*Koridor Siliguri*" (The Diplomat, 2013).

Wilayah sempit tersebut merupakan satu-satunya akses bagi India pusat untuk distribusi ke wilayah *Assam* selagi hubungan kerjasama ekonomi antara Bangladesh, India dan Tibet (Tiongkok) belum terbentuk. Sedangkan secara geografis, wilayah *Assam* (India) lebih berdekatan ke wilayah Tiongkok dibanding dengan jantung kota India. India secara keseluruhan memiliki PDB per kapita mendekati \$2000. Akan tetapi di India bagian timur laut tepatnya di daerah *Assam* yang berdekatan dengan Doklam, PDB per kapita masih terjebak diantara \$1000 (Forbes, 2018).

Kesenjangan perekonomian tersebut tentu menjadi kekuatiran tersendiri bagi India. Kemudahan akses jalan raya yang sedang dibangun oleh Tiongkok tentu membuat masyarakat India di wilayah *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya akan memikirkan ulang ketika mengambil bahan, maupun sumber daya produksi dari India pusat. Terlebih, secara geografis wilayah tersebut lebih dekat dengan Tiongkok daripada India pusat. Kesenjangan perekonomian antara India pusat dengan wilayah *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya tentu saja membuat wilayah tersebut kembali mempertimbangkan tentang faktor-faktor yang bisa membuat mereka lebih baik pada aspek perekonomiannya. Biaya serta efisiensi waktu akan menjadi pertimbangan yang kuat atas proses produksi. Apabila penciptaan jalan raya oleh Tiongkok menciptakan kemudahan aksesibilitas bagi wilayah *Assam* (India) dan sekitarnya, maka masyarakat wilayah tersebut akan lebih memilih untuk mengambil, maupun menjual hasil produksi ke wilayah Tiongkok berdasarkan pada efisiensi harga dan waktu.

Skema tentang kecenderungan lebih bergatungnya perekonomian India timur khususnya pada wilayah *Assam*, *Manipur*, dan sekitarnya serta Bhutan ke Tiongkok tentu menciptakan kerugian bagi perekonomian India. Pada kasus ini, India memiliki kepentingan perekonomian domestik, yakni mengontrol jalur distribusi perdagangan dari India Pusat menuju India Timur yang melewati

wilayah “*chicken’s neck*” tersebut. Salah satu faktor yang mengharuskan jalur distribusi melewati wilayah “*chicken’s neck*” dikarenakan kurangnya perjanjian perdagangan bebas antara India dan Bangladesh. Sehingga, akses ke daerah *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya tidak bisa melalui Bangladesh, akan tetapi harus berputar sedikit ke utara dan menyusuri “*Koridor Siliguri*”.

India baru memulai perihal perdagangan bebas dengan Bangladesh dan Nepal pada tahun 2002. Perundingan tersebut tentu bertujuan agar distribusi dari India pusat ke wilayah pinggiran seperti *Assam*, *Manipur* dan sekitarnya tidak lagi harus melewati “*Koridor Siliguri*” yang rawan tersebut. Ketiga negara yakni India, Bangladesh dan Nepal mulai membahas sebuah proposal untuk menciptakan perjanjian perdagangan bebas yang akan menjamin pergerakan barang mereka. Akan tetapi, pertemuan tersebut hingga saat ini masih belum melahirkan sebuah perjanjian perdagangan diantara mereka. Hingga akhirnya, wilayah “*chicken’s neck*” tetap menjadi pilihan utama dan satu-satunya meskipun termasuk kedalam kategori rawan. Fakta bahwa jalur kereta api tunggal adalah pembawa barang utama di wilayah tersebut telah rusak akibat tanah longsor dan bencana alam yang terjadi semakin menguatkan bahwa wilayah tersebut memiliki topografi yang keras (The Diplomat, 2013)

Berdasarkan pentingnya aksesibilitas diatas, maka India perlu menjaga dan bahkan memperbaharui akses dari India Pusat menuju ke India Timur agar distribusi dan kontrol semakin terjangkau. Wilayah India Timur seperti *Assam* dikenal sebagai salah satu daerah yang paling tidak stabil dan sensitif yang ditandai dengan banyaknya pemberontakan dan konflik etnis yang terjadi. Kasus inilah yang membuat India menempatkan wilayah *Assam* sebagai prioritas yang harus dibenahi. India pada akhirnya menempatkan wilayah *Assam* pada garis terdepan dalam pembangunannya di India Timur.

India memiliki strategi dan kebijakan “*act east*” yang mana merupakan perkembangan dari kebijakan “*India’s Look East*”. Kebijakan tersebut adalah upaya untuk memupuk hubungan ekonomi dan strategi yang luas dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional dan penyeimbang terhadap pengaruh strategi Tiongkok (Haokip, 2011). Strategi dan

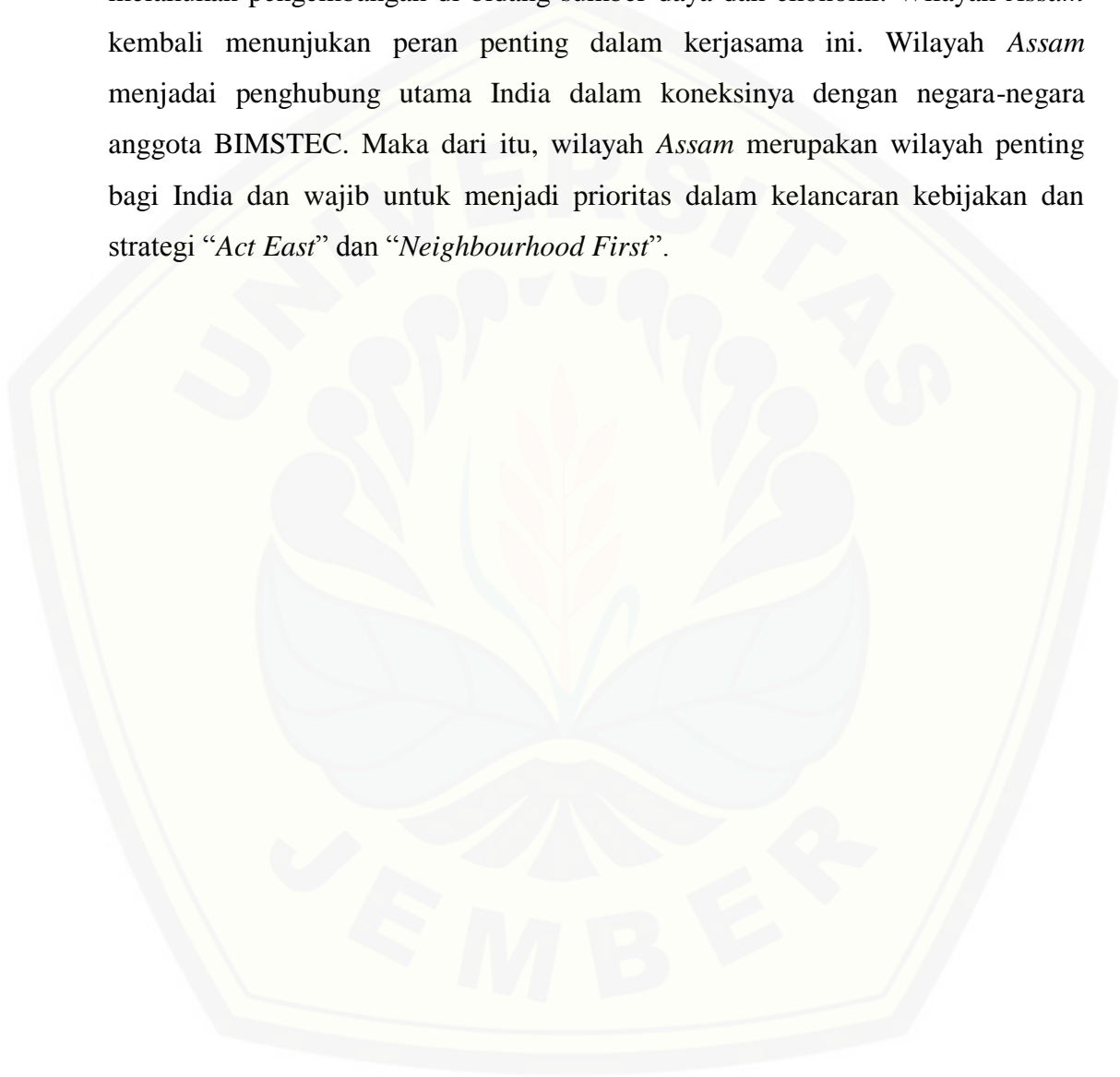
kebijakan “*Act East*” dan “*Neighbourhood First*” menempatkan wilayah *Assam* pada wilayah penting yang perlu diprioritaskan. India harus meredakan berbagai macam pemberontakan dan konflik etnis yang terjadi disana untuk menghidupkan kembali hubungan dan komunikasi antara India dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Bentuk nyata dari pentingnya wilayah *Assam* bagi India terjadi saat menandatangani perjanjian batas tanah (LBA) dengan negara tetangganya di sebelah Timur, yakni Bangladesh pada tahun 2015 silam (Haidar, 2015). Pada pengesahan undang-undang ini, India harus memastikan bahwa wilayah *Assam* sebagai wilayah perbatasan utama ikut serta dalam perjanjian tersebut. Perihal tersebut terjadi karena India harus meminta persetujuan setidaknya setengah dari badan legislatif negara bagian *Assam* sebelum disahkan, hal itu merupakan amandemen konstitusi India (Kaushal, 2015). Melihat pentingnya wilayah *Assam* bagi kelangsungan strategi dan kebijakan “*Act East*” dan “*Neighbourhood First*” India, maka negara perlu menjaga stabilitas kawasan maupun perekonomiannya wilayah *Assam* pada khususnya.

Wilayah *Assam* juga penting dalam kebijakan India terhadap Bhutan. India yang menginginkan untuk terhubung dengan Bhutan melalui pembukaan jalan raya yang menghubungkan wilayah *Tawang* dengan *Assam* melalui Bhutan Timur. Koneksi jalan raya tersebut akan meningkatkan perdagangan Bhutan dengan *Arunachal Pradesh*, *Assam*, dan *Benggal Barat* serta meningkatkan koordinasi keamanan wilayah perbatasan. Wilayah *Assam* juga menjadi penting untuk konektivitas regional India terhadap negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Konektivitas yang diusulkan seperti *Koridor Guwahati-chittagong* yang menempuh jarak 2276 kilometer yang menghubungkan antara *Guwahati* di wilayah *Assam* dengan *Myitkyina* di *Kachin* (Myanmar) (Patnaik, 2015). Koridor ini memiliki potensi untuk diwujudkan dalam kerjasama sub-regional India seperti BCIM, ASEAN, SAARC maupun GMS, yang akan mempermudah kebijakan “*Act East*” milik India.

Implementasi dari kebijakan tersebut terletak pada kerjasama BIMSTEC (*The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic*

*Cooperation*). Kerjasama tersebut merupakan kerjasama multi sektor yang digagas oleh India. BIMSTEC beranggotakan tujuh negara, yakni Thailand, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Bhutan dan India. Kerjasama sub-regional tersebut memiliki misi untuk memperdalam kekuatan regionalisme dan melakukan pengembangan di bidang sumber daya dan ekonomi. Wilayah *Assam* kembali menunjukkan peran penting dalam kerjasama ini. Wilayah *Assam* menjadai penghubung utama India dalam koneksinya dengan negara-negara anggota BIMSTEC. Maka dari itu, wilayah *Assam* merupakan wilayah penting bagi India dan wajib untuk menjadi prioritas dalam kelancaran kebijakan dan strategi “*Act East*” dan “*Neighbourhood First*”.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam memiliki sebuah fenomena yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. India yang tidak berkaitan dan berbatasan secara langsung dengan Doklam justru memilih untuk terlibat ke dalam konflik tersebut. Pada konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam ini, perilaku India sangat jelas menggambarkan bahwa mereka berpihak pada Bhutan untuk melawan Tiongkok. Keberpihakan India pada Bhutan tercermin pada pemblokiran yang dilakukan oleh militer India terhadap proyek jalan raya Tiongkok di Doklam yang dilakukan pada bulan Juli 2017. Keterlibatan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa kepentingan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan India dalam konflik perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam dikarenakan dua alasan. Pertama, India memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Bhutan dan mempertahankan hegemoni India di Bhutan. India dan Bhutan telah memiliki ikatan militer dan ekonomi yang kuat seperti yang telah tercatat dalam “India-Bhutan Friendship Treaty” pada tahun 2007. Oleh karena itu, India akan menjaga stabilitas keamanan dan pengaruhnya terhadap Bhutan dari ancaman Tiongkok untuk keberlangsungan hubungan kerjasama ekonomi dan militer India-Bhutan.

Kedua, India merupakan mitra dagang terbesar bagi Bhutan. Hal tersebut tertera pada impor Bhutan dari India yang mencapai 80,56% dari total impor Bhutan, dan ekspor Bhutan ke India mencapai angka 84,56% pada tahun 2017. Selain itu, India juga menjalin kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga air dengan Bhutan. Kerjasama tersebut telah memberikan keuntungan yang signifikan bagi India. India dapat membeli listrik yang murah dari Bhutan. India hanya perlu mengeluarkan biaya Rs. 1,5 per unit untuk memenuhi kebutuhan

listrik bagi masyarakatnya. Fakta bahwa 40% masyarakat India tidak memiliki akses listrik yang cukup menempatkan kerjasama tersebut di tempat utama untuk pengembangan bisnis dan industri di India. Oleh karena itu, India akan menjaga kerjasama-kerjasama perekonomian dengan Bhutan dari ancaman pengaruh Tiongkok.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bakry, U. S. (1999). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Cipto, B. (2006). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miro, F. (1997). *Sistem Transportasi Kota Bandung*. Bandung: Tarsito Bandung.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosida Karya.

### Jurnal:

- Arsenault, P. (2008). *China and the Authoritarian Model: The Relationship between Economic Freedom and Economic Growth*. Rutgers University, 1.
- Bhatnagar, A. (2016). *Neighbourhood First: Navigating Ties under Modi*. India: Global Policy Journal and Observer Research Foundation.
- Chaoden, T. (2018). *Indo-Bhutan Relation Recent Trends*. The Centre for Bhutan Studies, 116
- Ellis, S. (1997). *Key Issues in Rural Transport in Developing Countries*. England: Transport Research Laboratory.
- Haokip, T. (2011). *India's Look East Policy: Its Evolution and Approach*. South Asian Survey, 239-257.
- Joshi, M. (2017). *Doklam: To Start at the Very Beginning*. Observer Research Foundation, 1-17.
- Landwig, W. C. (2009). *Delhi's Pasific Ambition: Naval Power, 'Look east', and India's Emerging Role in the Asia-Pasific*. Asian Security, 98-101.
- Malone, D. M. (2010). *India and China: Conflict and Cooperation*. Research gate, 145.

- Mazumdar, S. (2011). *Continuity and Change in Indian Capitalism*. MPRA Paper, 1-3.
- Patnaik, J. K. (2015). *Act East through the North-East*. Mainstream.
- Pranav, K. (2010). *Sino-Bhutanese Relations: Under the Shadow of India-Bhutan Relations*. China Report, 245.
- Sarkar, R. (2007). *Political Scenario in Bhutan during 1774-1906: An Impact Analysis on Trade and Commerce*. Journal of Bhutan Studies, 1-19.
- Sarkar, T. (2017). *The Cooch Behar Imbroglia in the Late Eighteen Century: The Sannyasi Intrigue and the British Encounter*. Journal of Humanities and Social Science, 41.
- Savada, A. M. (1993). *Nepal and Bhutan: country studies*. Washington D C: Library of Congress.
- Setiawan, I. (2006). *Analisis Akses Desa-Desa di Kabupaten Bandung terhadap Sumber-Sumber Produktif*. Universitas Padjajaran: Laporan Penelitian Jurusan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian.
- Thierry, M. (2004). *Bhutan-China relations: Towards a New Step in Himalayan Politics, in The Spider and The Piglet*. The Center for Bhutan Studies, 388-413.
- Uberoi, P. (2014). *The BCIM Economic Corridor: A Leap into the Unknown?* Institute of Chinese Studies, 12-18.

## **Internet:**

- Apdf Magazine. (2017, Agustus 16). *Upaya DiplomatiK untuk mengakhiri kebuntuan Sino-India di Doklam*. Retrieved September 9, 2018, from Apdf-magazine: <http://apdf-magazine.com/id/upaya-diplomatik-untuk-mengakhiri-kebuntuan-sino-india-di-doklam/>
- Arab News. (2017, Juli 19). *China holds live-fire drills in disputed Himalayan teritory, tells India to withdraw*. Retrieved Februari 27, 2019, from [www.arabnews.com: www.arabnews.com/node/1131641/world](http://www.arabnews.com/node/1131641/world)
- Asia Times News. (2018, Februari 21). *Beyond Doklam 2.0: does China aim to absorb Bhutan and Nepal?* Retrieved September 11, 2018, from [asiatimes.com: https://www.asiatimes.com/2018/02/opinion/beyond-doklam-2-0-china-aim-absorb-bhutanand-nepal/](https://www.asiatimes.com/2018/02/opinion/beyond-doklam-2-0-china-aim-absorb-bhutanand-nepal/)



- Bhutan News Online. (2004, Juli 5). *Bhutan-China Relations*. Retrieved Februari 20, 2019, from bhutannewsonline.com: [https://web.archive.org/web/20091227142229/http://www.bhutannewsonline.com/bhutan\\_china.html](https://web.archive.org/web/20091227142229/http://www.bhutannewsonline.com/bhutan_china.html)
- Brands, H. (2018, Juni 11). *China's Master Plan: Exporting an Ideology*. Retrieved Maret 12, 2019, from Bloomberg opinion: <https://www.google.com/amp/s/www.bloomberg.com/amp/opinion/articles/2018-06-11/china-s-master-plan-exporting-an-ideology>
- Clinton, H. (2011, Oktober 11). *America's Pasific Century*. Retrieved Maret 8, 2019, from foreignpolicy.com: <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pasific-century/>
- Convention between Great Britain and China relating to Sikkim and Tibet. (1890, Maret 1890). *Convention of March 17th 1890 between Great Britain and China relating to Sikkim and Tibet*. Retrieved Februari 20, 2019, from www.claudearpi.net: <https://www.claudearpi.net/uploads/2016/11>
- Ecns. (2017, Agustus 3). *U.S. scholar: India should remember the history*. Retrieved Februari 27, 2019, from www.ecns.cn: [www.ecns.cn/m/voices/2017/08-03/267944.shtml](http://www.ecns.cn/m/voices/2017/08-03/267944.shtml)
- Economic Times. (2018, Juli 12). *India wants to bury the Doklam ghost, but what about the spectre of CPEC?* Retrieved Mei 05, 2019, from www.economictimes.com: [https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/defence/india-wants-to-bury-the-doklam-ghost-but-what-about-the-spectre-of-cpec/amp\\_articleshow/60378192.cms](https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/defence/india-wants-to-bury-the-doklam-ghost-but-what-about-the-spectre-of-cpec/amp_articleshow/60378192.cms)
- Economic Times. (2018, Juli 13). *No dispute with Bhutan in Doklam: China*. Retrieved Februari 27, 2019, from m.economicstimes.com: <https://m.economictimes.com/news/defence/no-dispute-with-bhutan-in-doklam-china/articleshow/59456533.cms>
- Economics Discussion. (2014, Februari 23). *Growth of Indian Capitalist Enterprise*. Retrieved Mei 1, 2019, from www.economicdiscussion.net: <https://www.economicdiscussion.net/indian-economy/growth-of-indian-capitalist-enterprise-indian-economy/19013>
- Economic Times. (2018, Juli 14). *Indian bunker in Sikkim removed by China*. Retrieved September 9, 2018, from Economicstimes.com: <https://www.google.com/amp/s/m.economicstimes.com/news/defence/indian>

-bunker-in-sikkim-removed-by-china-  
sources/amp\_articleshow/59355080.cms

Forbes. (2018, Februari 21). *Why India's 'Act East' Needs China -- And China's 'Go West' Needs India*. Retrieved September 15, 2018, from [www.forbes.com](http://www.forbes.com):

<https://www.forbes.com/sites/salvatorebabones/2018/02/21/why-indias-act-east-needs-china-and-chinas-go-west-needs-india/#2d8d13c92d87>

Foreign Affairs. (2017, Agustus 9). *The Doklam isute in Context*. Retrieved April 28, 2019, from [www.foreignaffairs.com](http://www.foreignaffairs.com):  
<https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2017-08-09/doklam-dispute-context>

Goldberg, J. (2013, Agustus 30). *The Obama Doctrine*. Retrieved Maret 8, 2019, from [theatlantic.com](http://theatlantic.com):  
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/>

Haidar, S. (2015, Mei 5). *Assam Included in Bill for Land Swap With Bangladesh*. Retrieved April 29, 2019, from The Hindu:  
<https://www.thehindu.com/news/national/indiabangladesh-land-deal-centre-includes-assam-in-itsbill/article7173440.ece>

Harian Jejak Tapak. (2017, Agustus 14). *Kebuntuan Doklam Belum Berujung, India Terus Memompa Kekuatannya*. Retrieved September 9, 2018, from [jejaktapak.com](http://jejaktapak.com):  
<https://www.jejaktapak.com/2017/08/14/kebuntuan-doklam-belum-berujung-india-terus-memompa-kekuatannya/>

Harian Seputar Indonesia. (2017, Juli 24). *Sengketa Batas dengan India, China Ancam Kerahkan Banyak Pasukan*. Retrieved September 9, 2018, from [sindonews.com](http://sindonews.com):  
<https://international.sindonews.com/read/1223462/40/sengketa-batas-dengan-india-china-ancam-kerahkan-banyak-pasukan-1500883248>

India-Bhutan Friendship Treaty. (2007, Maret 2). *India-Bhutan Friendship Treaty*. Retrieved September 9, 2018, from [Mea.gov.in](http://Mea.gov.in): dari <https://mea.gov.in/Images/pdf/india-bhutan-treaty-07.pdf>

Kaura, V. (2018, Januari 1). *Grading India's Neighbourhood Diplomacy*. Retrieved April 29, 2019, from The Diplomat:  
<https://thediplomat.com/2017/12/grading-indias-neighbourhood-diplomacy/>

- Kaushal, P. (2015, Mei 6). *Assam in, Govt Oks India-Bangladesh Border Swap Deal*. Retrieved April 2019, 2019, from Indian Express: <https://indianexpress.com/article/india/india-others/assam-ingovt-oks-india-bangladesh-border-swap-deal/>
- Ministry of External Affairs Government of India. (2017, Juni 30). *Recent Developments in Doklam Area*. Retrieved Februari 27, 2019, from [www.mea.gov.in](http://www.mea.gov.in): [https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28572/Recent\\_Developments\\_in\\_Doklam\\_Area](https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28572/Recent_Developments_in_Doklam_Area)
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2017, Juni 30). *Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang's Regular Press Conference*. Retrieved Februari 27, 2019, from [www.fmprc.gov.cn](http://www.fmprc.gov.cn): [https://web.archive.org/web/20180201110831/http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xwfw\\_665399/s2510\\_665403/t1474637.shtml](https://web.archive.org/web/20180201110831/http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665403/t1474637.shtml)
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2017, Agustus 2). *The Facts and China's Position Concerning the Indian Border Troops' Crossing of the China-India Boundary in the Sikkim Sector into the Chinese Territory*. Retrieved Februari 27, 2019, from [www.fmprc.gov.cn](http://www.fmprc.gov.cn): [https://web.archive.org/web/20170809021624/http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/wjdt\\_665385/2649\\_665393/P020170802542676636134.pdf](https://web.archive.org/web/20170809021624/http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/P020170802542676636134.pdf)
- Ministry of Foreign Affairs Royal Government of Bhutan. (2017, Juni 29). *Press Release*. Retrieved Februari 19, 2019, from [ww.mfa.gov.bt](http://www.mfa.gov.bt): <https://www.mfa.gov.bt/?p=4799>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2017, Agustus 3). *Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Remarks on the Indian Border Troops' Illegal Crossing of the China-India Boundary into the Chinese Territory*. Retrieved Februari 27, 2019, from [www.fmprc.gov.cn](http://www.fmprc.gov.cn): [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xwfw\\_665399/s2510\\_665405/t1482345.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665405/t1482345.shtml)
- Reuters. (2017, Agustus 28). *China says Indian forces have withdrawn to Indian side of disputed border*. Retrieved September 10, 2018, from [reuters.com](http://reuters.com): <https://www.reuters.com/article/us-china-india/china-says-indian-forces-have-withdrawn-to-indian-side-of-disputed-border-idUSKCN1B80LI>
- Reuters. (2017, Agustus 28). *India and China agree to end border standoff*. Retrieved September 10, 2018, from [uk.reuters.com](http://uk.reuters.com): <https://uk.reuters.com/article/uk-india-china-idUKKCN1B80IE?rpc=401&>

- Shahin, S. (2003, Oktober 11). *India's 'Look East' Policy Pays off*. Retrieved Maret 8, 2019, from [globalpolicy.org](http://globalpolicy.org): <https://www.globalpolicy.com/component/content/article/162/27908.html>
- Sputnik News. (2017, Desember 15). *We're Back: China Resumes Military Buildup in Disputed Doklam Plateau*. Retrieved September 10, 2018, from [sputniknews.com](http://sputniknews.com): <https://sputniknews.com/asia/201712151060013043-doklam-china-nilitary-buildup-resumes/>
- The Diplomat. (2013, November 8). *Geography's Curse: India's Vulnerable 'Chicken's Neck'*. Retrieved Februari 27, 2019, from [TheDiplomat.com](http://TheDiplomat.com): <https://thediplomat.com/2013/11/geographys-curse-indias-vulnerable-chickens-neck/>
- The Diplomat. (2017, Juli 27). *India-China Doklam Standoff: A Chinese Perspective*. Retrieved Februari 28, 2019, from [thediplomat.com](http://thediplomat.com): <https://thediplomat.com/2017/07/india-china-doklam-standoff-a-chinese-perspective/>
- The Diplomat. (2017, Juni 13). *The Political Geography of the India-China Crisis at Doklam*. Retrieved Februari 28, 2019, from [TheDiplomat.com](http://TheDiplomat.com): <https://thediplomat.com/2017/07/the-political-geography-of-the-india-china-crisis-at-doklam/>
- The Indian Express. (2017, Juli 24). *Behind the ongoing stand-off in Doklam, century-old manoeuvres of geostrategy*. Retrieved Februari 27, 2019, from [indianexpress.com](http://indianexpress.com): <https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/behind-the-ongoing-stand-off-in-doklam-century-old-manoevres-of-geostrategy-4735805/lite/>
- The State Council The People's Republic of China. (2015). *Chronology of China's Belt and Road Initiative*. Beijing.
- The Straits Times. (2017, Agustus 30). *Bhutan welcomes end to China-India stand-off*. Retrieved September 11, 2018, from [www.thestraitstimes.com](http://www.thestraitstimes.com): <https://www.thestraitstimes.com/asia/bhutan-welcomes-end-to-china-india-stand-off>
- The Straits Times. (2019, Februari 2). *US Spies elevate China rivalry to war of ideologies*. Retrieved Maret 12, 2019, from [thestraitstimes.com](http://thestraitstimes.com): <https://www.straitstimes.com/world/united-states/us-spies-elevate-china-rivalry-to-war-of-ideologies>

- Tirto. (2017, Agustus 8). *Perselisihan antara Cina dan India yang Tak Kunjung Usai*. Retrieved September 10, 2018, from Tirto.id: <https://tirto.id/perselisihan-antara-cina-dan-india-yang-tak-kunjung-usai-ct8E>
- Trading Economics. (2012). *Bhutan eksport from India*. Retrieved September 15, 2018, from [tradingeconomics.com: https://tradingeconomics.com/bhutan/exports/india](https://tradingeconomics.com/bhutan/exports/india)
- Trading Economics. (2012). *Bhutan import from India*. Retrieved Februari 15, 2018, from [tradingeconomics.com: https://tradingeconomics.com/bhutan/imports/india](https://tradingeconomics.com/bhutan/imports/india)
- Wischer, G. (2019, Maret 16). *China eyes Cracks in a Strategic Indian Partnership*. Retrieved Mei 12, 2019 from [intpolicydigest.org: https://www.google.com/amp/s/intpolicydigest.org/2019/03/16/china-eyes-cracks-in-a-strategic-indian-partnership/amp/](https://www.google.com/amp/s/intpolicydigest.org/2019/03/16/china-eyes-cracks-in-a-strategic-indian-partnership/amp/)